



LAPORAN KINERJA

PEJABAT ADMINISTRATOR

2023

SEKRETARIS

ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780410 199703 1 005

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
1.2 Struktur Jabatan	1
1.3 Isu Strategis	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
2.1 Perjanjian Kinerja	4
2.2 Rencana Aksi	4
2.3 Analisis Kinerja	4
2.3.1 Capaian Kinerja	4
2.3.2 Analisis Pencapaian Program	7
2.4 Kinerja Keuangan	7
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	9
3.2 Rekomendasi	9

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.3.1. a : Capaian Kinerja Program Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	5
Tabel 2.3.1. b : Realisasi Capaian Kinerja Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	6
Tabel 2.4.1 : Capaian Kinerja Keuangan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	8

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur organisasi jabatan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
..... 2

KATA PENGANTAR

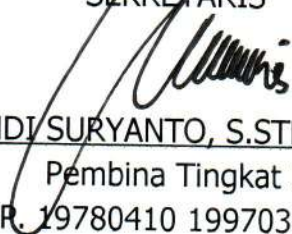
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Sekretaris pada Kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024
SEKRETARIS


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

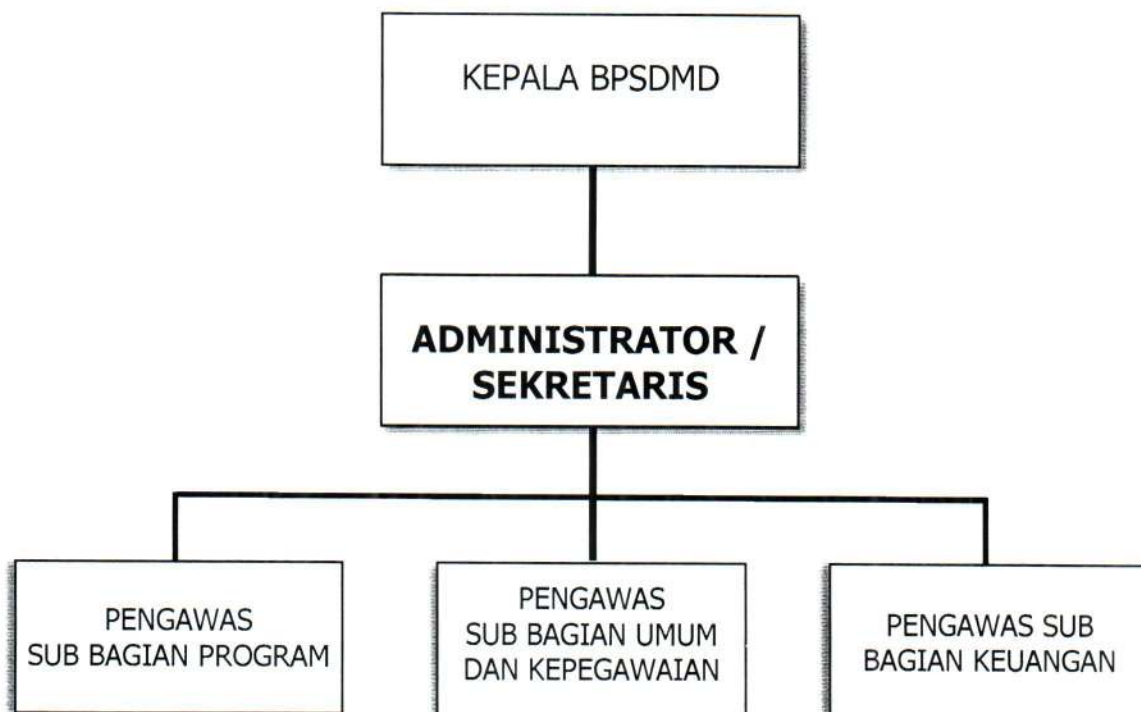
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Pelaksanan tugas tersebut, merupakan fungsi dari Kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- a. Penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan badan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan badan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan badan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan badan;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Jabatan

Struktur Jabatan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021, sebagaimana gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Jabatan Sekretaris
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021

1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di periode mendatang.

Isu-isu strategis utama yang perlu diperhatikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada periode Renstra 2018 – 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Badan dan Sekretaris antara lain :

1. Sejalan dengan era digital, pemanfaatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perlu ditingkatkan;
2. Perlunya pengintegrasian Database Kepegawaian terkait dengan Akurasi data dan Sistem Informasi Kepegawaian khususnya pengembangan kompetensi;
3. Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dalam organisasi;
4. Jumlah ASN yang memiliki kompetensi terkait pelayanan publik belum memadai;

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) tanggal 31 Januari 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 22 November 2023 mencakup satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, beberapa sasaran kegiatan, diantaranya :

- a. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
- c. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur; dan
- d. Terpenuhi dan terealisasikannya anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang diperjanjikan Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Pencapaian serapan anggaran secara efektif dan efisien melalui Perencanaan pengembangan kompetensi dan kegiatan Sekretariat;
2. Penguatan Teknologi Informasi sebagai pendukung pelaksanaan Pengembangan kompetensi telah dilakukan secara optimal melalui kinerja Tim PPID Sekretariat sehingga mendapat penghargaan informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Awards Tahun 2023;
3. Proses penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaporan, evaluasi internal dilaksanakan secara akuntabel serta berkinerja tinggi ditandai peningkatan nilai SAKIP menjadi sebesar 84,30 dari semula 83,30.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : $\geq 91\%$;
- b. Tinggi : 76 – 90,99%;

- c. Sedang : 66 – 75,99%;
- d. Rendah : 51 - 65,99%;
- e. Sangat Rendah : ≤ 50,99%.

Tabel 2.3.1.a
Capaian Kinerja Dan Anggaran (Cost Per Outcome)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
2.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.3.1.1.b
Realisasi Capaian Kinerja Sekretaris
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)				Capaian (%)
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.	Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	50 %	75 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table 2.2.a, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "**Sangat Tinggi**". Hal ini dikarenakan capaiannya telah mencapai 100 %.

2.3.2 Analisis Pencapaian Program

Pencapaian Program pada Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut :

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

1. Sasaran Strategis Program :

- 1) Terwujudnya Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.
- 2) Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Indikator Program :

- 1) Persentase / Jumlah ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan kinerja perangkat daerah.
- 2) Formula Indikator Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3. Faktor yang mendukung keberhasilan :

- 1) Sasaran dan prasarana yang mencukupi.
- 2) Dukungan sistem informasi SIMAPAN SDM.

4. Hambatan :

- 1) masih ada unit kerja yang kualifikasi SDM-nya belum memadai.
- 2) Kerusakan SAPRAS yang tidak dapat diprediksi.

5. Tindaklanjut :

- 1) Dilakukan penempatan pegawai berdasarkan jenis, tingkat kesulitan dan tanggungjawab sesuai persyaratan kualifikasi.
- 2) Anggaran pemeliharaan SARPAS ditingkatkan serta dilakukan monitoring, SARPAS secara periodik setiap bulan melalui rapat koordinasi pengendalian.

2.4 Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Capaian Kinerja Keuangan Sekretaris
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	50.515.186.000	46.731.513.193	92,51 %
2.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	457.000.000	449.509.956	98,36 %
	Total		50.972.186.000	47.181.023.149	92,56 %

Berdasarkan tabel 2.4.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar **92,56 %**. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp.3.791.162.851,- atau sebesar 7,44 %. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Honor Narasumber dan kelebihan mengajar sesuai kebutuhan.
2. Gaji dan tunjangan sesuai realisasi jumlah pegawai.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas, maka diketahui bahwa capaian kinerja program Capaian Kinerja Keuangan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah "**Sangat Tinggi**". Hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Kinerja Operasional (RKO) dan sesuai kebutuhan. Maka perhitungan tabel 2.4.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar **92,56 %**.

Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 3.791.162.851,- atau sebesar 7,44 %. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Honor Narasumber dan kelebihan mengajar sesuai kebutuhan.
2. Gaji dan tunjangan sesuai realisasi jumlah pegawai.

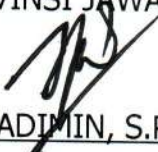
3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi dalam upaya peningkatan kinerja program dan kegiatan pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

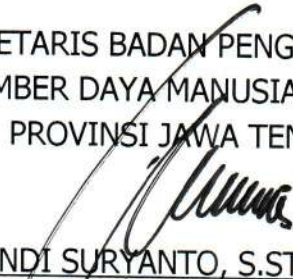
1. Peningkatan perencanaan program dan anggaran lebih presisi sehingga kegiatan Sekretariat dan Pengembangan Kompetensi dapat berjalan optimal;
2. Evaluasi dan analisis permasalahan pada program dan kegiatan, pada setiap bulannya lebih intensif sehingga kinerja dan serapan anggaran dapat optimal;
3. Perlu dilakukan alih tugas untuk pemerataan kualitas pegawai.

Semarang, Januari 2024

Mengetahui
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. SADIJIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP 19721206 199412 1 001

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si.
Jabatan : Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Jabatan : Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100

No

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

Rp 50.515.186.000,-

APBD

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD

Rp 457.000.000,-

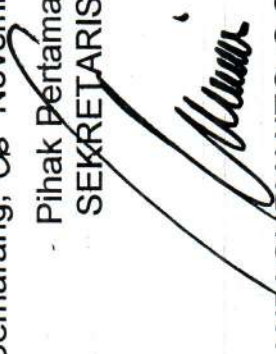
APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. SADIHMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Semarang, 06 November 2023

Pihak Pertama,
SEKRETARIS


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005



LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR 2024

**SERTIFIKASI KOMPETENSI
DAN PENJAMINAN MUTU**

**BPSDMD
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
1.2 Struktur Jabatan	1
1.3 Isu Strategis	2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja	3
2.2 Rencana Aksi	3
2.3 Analisis Kinerja	4
2.3.1 Capaian Kinerja	4
2.3.2 Analisis Pencapaian Program	10
2.4 Kinerja Keuangan	13

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan	16
3.2 Rekomendasi.....	16

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3 a : Capaian Kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Prov Jateng Tahun 2023.....	5
Tabel 2.3 b : Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Prov Jateng Tahun 2023	8
Tabel 2.4.1 : Capaian Kinerja Keuangan Kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu Prov Jateng Tahun 2023.....	14

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	2
---	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.


Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ~~68~~ Tahun ~~2016~~ tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2024

KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU



SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19771021 199703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sertifikasi kompetensi, pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi, dan pengendalian mutu dan kerjasama yang meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sertifikasi Kompetensi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi.
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengendalian mutu dan kerjasama;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Jabatan

Struktur Jabatan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

1.3 Isu Strategis

Gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu adalah Urgensi Peran Strategic Partnership dalam Pengembangan Kompetensi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan pengetahuan kemampuan pegawai. Transformasi Paradigma Pengembangan Kompetensi. Transformasi dari Training and Development ke In Learning Development. Transformasi pembelajaran digital efektivitas pembelajaran dan efisiensi anggaran. Metode e-learning blended learning, distance learning sebagai satu metode pembelajaran menjadi semakin dibutuhkan pada saat dunia dihadapkan pada era society 5.0.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan mencakup 2 Kegiatan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- 2) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Adapun PK Bidang Sertifikasi pada Badan Pengembangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu dalam pencapaian target yang diperjanjikan tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Penyampaian laporan hasil evaluasi pra penyelenggaraan diklat, evaluasi tenaga pengajar dan evaluasi penyelenggaraan diklat kepada bidang, sekretariat dan widyaiswara.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan di kabupaten/kota dan alumni diklat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ada di kabupaten/kota.
3. Melakukan rapat bulanan dengan Tim Komite Penjaminan Mutu Diklat.
4. Melakukan rapat bulanan terkait dengan pemeliharaan ISO 9001:2015
5. Melakukan konsultasi akreditasi lembaga diklat ke Kementerian / Lembaga Teknis yang terkait.
6. Melakukan pembahasan dengan Akademisi / Praktisi dalam penyusunan pedoman / petunjuk teknis.
7. Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan OPD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Sertifikasi Kompetensi ASN;
8. Peningkatan koordinasi dengan OPD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah terkait Uji Kompetensi yang efektif dan efisien dan terintegrasi

9. Peningkatan dan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran sehingga dapat dilakukan penyesuaian.
10. Peningkatan peran Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
11. Daerah Provinsi Tengah dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab bidang.
12. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : $\geq 91\%$;
- b. Tinggi : 76 – 90,99%;
- c. Sedang : 66 – 75,99%;
- d. Rendah : 51 - 65,99%;
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

Tabel 2.3.a
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

No.	Program/Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Identifikasi pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	82%	86,84%	100%
			Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	3,5	3,606	100%
			Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	93,17%	93%	

**Tabel 2.3.b Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi**

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)				Capaian (%)
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							
		Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	82%	0 dok	91,17	86,84	86,84	86,84
		Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	3,5	0	3,51	3,51	3,6	3,6
		Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	93,17%	0	82,67	85	93	93

Berdasarkan tabel 2.2.a, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Sangat Tinggi.

2.3.2 Analisis Pencapaian Program

Pencapaian Program pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Sasaran Strategis

Terwujudnya Identifikasi pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN
 - b. Indikator
 - 1) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti
Formula Indikator : $\frac{\text{Usulan Perencanaan yang ditindaklanjuti sesuai dengan Sijari AKPK/ Perencanaan yang ditindaklanjuti dalam Ebudgeting}}{X} \times 100$
 - 2) Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan
Formula Indikator : Indeks Penjaminan Mutu Pelatihan
 - 3) Persentase PNS yang lulus uji kompetensi
Formula Indikator : $\frac{\text{PNS yang lulus Ujikom}}{\text{Jumlah Peserta Ujikom}} \times 100$
 - c. Faktor yang mendukung keberhasilan
 - 1) Adanya Koordinasi yang baik dalam memfasilitasi Penyusunan Rencana Bangkom di OPD maupun di Kab./Kota Prov. Jateng melalui SijariOnAKPK
 - 2) Adanya Koordinasi yang baik dalam pembinaan dan pengawasan melalui evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan di kabupaten/kota dan alumni diklat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ada di kabupaten/kota.
 - 3) Adanya Koordinasi baik dalam Peningkatan koordinasi dengan OPD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah terkait Uji Kompetensi yang efektif dan efisien dan terintegrasi.
 - d. Hambatan
 - 1) Tidak semuanya usulan dari OPD/Kab. Kota terfasilitasi dikarenakan terbatasnya anggaran dan jumlah usulan yang kurang dari 30 peserta
 - 2) Jadwal Penugasan Mengajar Widyaiswara yang berubah menyebabkan Kegiatan Sistem Evaluasi dan Monitoring kurang terlaksana dengan baik

- 3) Kelulusan Ujikompetensi yang rendah
- e. Tindak Lanjut
- 1) Penyusunan Metode Bangkom MOOC yang diharapkan dapat menjangkau banyak peserta sehingga pemenuhan 20 JP per tahun dapat terpenuhi
 - 2) Pengoptimalan dalam penjadwalan Penugasan Widyaiswara utamanya dalam penginputan jadwal melalui sistem
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan OPD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah terkait Pemanggilan Peserta Uji Kompetensi yang efektif dan efisien dan terintegrasi agar kelulusan sertifikasi kompetensi meningkat

2.4 Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Capaian Kinerja Keuangan
Bidang Sertifikasi Kompetensi dan
Penjaminan Mutu
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.608.539.000	1,575,597,523	97,95

Berdasarkan tabel 2.3.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2023 sebesar **97,95%**. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 32.941.477 atau 2,05%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Efisiensi Honorarium
2. Efisiensi Konsumsi

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Sangat Tinggi dengan serapan anggaran sebesar 97,95 % sehingga dapat dikategorikan "Sangat Tinggi".

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Semarang, 2024

Mengetahui
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Tingkat Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU



SRI SULISTİYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Jabatan : KEPALA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

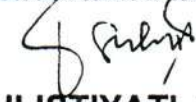
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**


Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU**


SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	82%
		Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan	3,5
		Persentase PNS yang lulus Uji Kompetensi	93,17%

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Rp. 1.308.407.000,-	APBDP
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 300.132.000,-	APBDP

Semarang, 66 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH**



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG
 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
 PENJAMINAN MUTU**



SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700112 199203 2 006



LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS

TAHUN 2023

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	1
1.2. Struktur Jabatan.....	2
1.3. Isu Strategis	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
2.1. Perjanjian Kinerja	4
2.2. Rencana Aksi	4
2.3. Analisis Kinerja.....	4
2.3.1. Capaian Kinerja.....	4
2.3.2. Analisis Pencapaian Program	7
2.4. Kinerja Keuangan	8
BAB III PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	9
3.2. Rekomendasi	9

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3.a. Capaian Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	5
Tabel 2.3.b. Realisasi Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	6
Tabel 2.4.1. Capaian Kinerja Keuangan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	8

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS



SUMARHENDRO, S.Sos

Pembina

NIP. 19670922 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

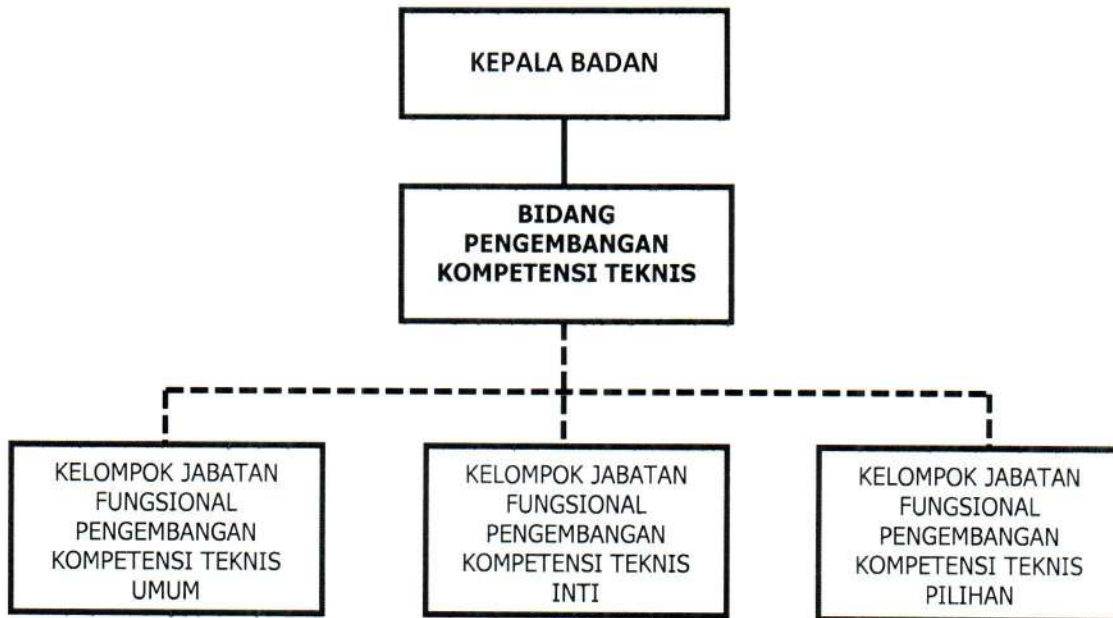
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis umum;

1.2. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 berikut ini :



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri atas:

- Sub bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
- Sub bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti; dan
- Sub bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.

Sesuai dengan perkembangan regulasi melalui penyederhanaan birokrasi, sub bidang - sub bidang sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh pejabat fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda yang menjalankan tugas selaku Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

1.3. Isu Strategis

Sesuai tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, merupakan bidang penyelenggara pengembangan kompetensi teknis. Adapun beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis dan berpengaruh bagi kinerja organisasi antara lain :

1. Munculnya beragam regulasi / peraturan baru terkait pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur. Salah satunya adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang sedikit banyak telah mengubah paradigma manajemen ASN, utamanya dari aspek pengembangan kompetensi.
2. Reformasi Birokrasi telah menunjukkan adanya dinamika perubahan pada organisasi dan tata kelolanya. Hal ini harus diikuti dengan pemenuhan kompetensi bagi SDM Aparatur melalui beragam program pengembangan kompetensi, khususnya yang berkaitan dengan organisasi, kelembagaan dan kepegawaian.
3. Upaya mewujudkan Jawa Tengah Corporate University sebagai suatu entitas pengembangan SDM Aparatur secara terintegrasi. Untuk itu, kolaborasi antar *stakeholder* dan penguatan kelembagaan sangat diperlukan, sehingga beragam program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dapat selaras dan relevan dengan program-program prioritas dalam pembangunan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana dilakukan perubahan pada tanggal 6 Nopember 2023 yaitu persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis yaitu sebesar 100%, dengan target jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis sejumlah 2.650 orang. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

2.2. Rencana Aksi

Rencana Aksi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dalam pencapaian target yang diperjanjikan yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum,
2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis inti,
3. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis pilihan.

2.3. Analisis Kinerja

2.3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- b. Tinggi : 76 - 90,99%
- c. Sedang : 66 - 75,99%;
- d. Rendah : 51 - 65,99%;
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

Tabel 2.3.a.
 Capaian Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	2.650 orang	4.268 orang	161,06%

Tabel 2.3.b.
 Realisasi Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)				Capaian (%)
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	100	100	100	100	100	100

Dari tabel 2.3.a. dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dari 1 (satu) program dengan indikator Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis yaitu 100% atau termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini dikarenakan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan, baik berdasar akreditasi maupun sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015.

2.3.2. Analisis Pencapaian Program

Capaian kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Sasaran Strategis Program
Terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN
 - b. Indikator Program
 - 1) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis
 - 2) Formula Indikator : $\frac{\text{Jumlah peserta yang lulus pengembangan kompetensi teknis}}{\text{Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis}} \times 100\%$
 - c. Faktor yang Mendukung Keberhasilan
 - 1) Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan berdasar kebutuhan penggunaannya.
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
 - d. Hambatan
 - 1) Belum terbangunnya kesamaan persepsi antar *stakeholder* dalam hal pengembangan kompetensi.
 - 2) Dinamika perubahan di organisasi (baik internal maupun eksternal) yang terkait dengan regulasi, ketersediaan anggaran, sarana prasarana, SDM, maupun sumber daya lainnya.

e. Tindak Lanjut

- 1) Mitigasi resiko dalam menghadapi dinamika perubahan.
- 2) Menyusun langkah alternatif solusi bagi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis.

2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling, adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4.1.

Capaian Kinerja Keuangan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	3.402.130.000	3.040.771.968	89,38

Berdasarkan tabel 2.3.1. dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 89,38%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sudah **Baik**, meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 361.358.032,00 atau sebesar 10,62%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

- Belanja honorarium narasumber / pengajar pelatihan menyesuaikan jumlah jam pelajaran dalam kurikulum yang ditetapkan dan level pengajar yang melaksanakan tugas. Selain itu, beberapa materi pelatihan yang sedianya disampaikan oleh tenaga pengajar dari luar instansi, dapat diampu oleh tenaga pengajar dari internal / widyaiswara, sehingga belanja honorarium tidak terserap maksimal.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja program Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan, baik berdasar akreditasi maupun sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015.

Sedangkan berdasarkan tabel 2.3.1. dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 89,38%, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan masuk dalam kategori **Baik**, meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 361.358.032,00 atau sebesar 10,62%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan : Belanja honorarium narasumber / pengajar pelatihan menyesuaikan jumlah jam pelajaran dalam kurikulum yang ditetapkan dan level pengajar yang melaksanakan tugas. Selain itu, beberapa materi pelatihan yang sedianya disampaikan oleh tenaga pengajar dari luar instansi, dapat diampu oleh tenaga pengajar dari internal / widyaiswara, sehingga belanja honorarium tidak terserap maksimal.

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis di tahun yang akan datang (Tahun 2024) adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap program dan kegiatan, agar selaras dan relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga mampu menunjang capaian kinerja organisasi.

2. Perlu dilakukan perbaikan pola perencanaan dan penerapan sistem pemantauan kegiatan yang lebih akurat, sehingga capaian kinerja keuangan mampu lebih optimal dan selaras dengan capaian kinerja program dan kegiatan.

Mengetahui
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Semarang, Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS



SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina
NIP. 19670922 199803 1 006

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARHENDRO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIK

SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina
NIP. 19670922 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 3.402.130.000	APBD .
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis		

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH


Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721206 199412 1 001

Semarang, & November 2023
 Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS


SUMARHENDRO, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19670922 199803 1 006



BPSDMD

PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA (LKj)

BIDANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI-----	1
DAFTAR TABEL-----	2
DAFTAR GAMBAR-----	3
KATA PENGANTAR-----	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan-----	5
1.2 Struktur Jabatan-----	6
1.3 Isu Strategis-----	7
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
2.1 Perjanjian Kinerja-----	8
2.2 Rencana Aksi-----	8
2.3 Analisis Kinerja-----	8
2.3.1 Capaian Kinerja-----	8
2.3.2 Analisis Pencapaian Program-----	11
2.4 Kinerja Keuangan-----	12
BAB III PENUTUP	
A Kesimpulan-----	15
B Rekomendasi-----	15

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.3.a	Capaian Kinerja Program Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	10
Tabel 2.3.b	Realisasi Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.4.1	Capaian Kinerja Keuangan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	12

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah -----	6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategik 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL



Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19730501 199801 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional, Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional, dan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional. Pelaksanaan tugas tersebut, merupakan fungsi dari Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Struktur Jabatan

Struktur jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

1.3 Isu Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Renstra tahun 2018 – 2023 menegaskan bahwa faktor utama dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi adalah cakupan penyelenggaraan pelatihan, yaitu jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, serta faktor kualitas pelatihan meliputi standar mutu pelaksanaan pelatihan dan alumni pelatihan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan instansi / organisasi pengguna.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi aparatur antara lain rendahnya minat aparatur dalam pengembangan kompetensinya, kurangnya jenis pelatihan yang mengakomodir semua kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, serta belum terpadunya rencana pengembangan kompetensi. Hal itu menjadi isu strategis dalam upaya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur. Kondisi tersebut merupakan suatu tantangan sehingga diperlukan penanganan yang tepat agar menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis tersebut :

- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah agar lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan baik di tingkat lokal, regional, dan nasional;
- Transformasi teknologi pengembangan kompetensi melalui pembelajaran digital;
- Penerapan budaya belajar di setiap stakeholder / instansi pengguna;
- Penerapan *core value* (prinsip utama) ASN sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB, yaitu ASN Ber-AKHLAK;
- Birokrasi berkelas dunia menuju SMART ASN.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2023 mencakup satu program yaitu Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan sasaran kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang diperjanjikan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional;
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional;

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa

Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi e-controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi : ≥ 91 %
- b. Tinggi : 76 – 90,99 %
- c. Sedang : 66 – 75,99 %
- d. Rendah : 51 – 65,99 %
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99$ %

Tabel 2.3.a
 Capaian Kinerja Program
 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi jabatan fungsional	Prosentase ASN yang lulus Pelatihan Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional	100%	100%	100%
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional	4.260	4.351	102,14%

Tabel 2.3.b
 Realisasi Capaian Kinerja
 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)				Capaian (%)
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Prosentase ASN yang lulus Pelatihan Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional	100	100	100	100	108,56	102,14

Dari tabel 2.3.a tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dari 1 kegiatan dengan 1 (satu) indikator rata-rata capaian kinerjanya 102,14% atau **"Sangat Tinggi"**.

2.3.2 Analisis Pencapaian Program

Pencapaian program pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dapat dicapai dengan upaya sebagaimana berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Sasaran Strategis Program
Meningkatnya kompetensi ASN
 - b. Indikator Program
 - 1) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi jabatan fungsional
 - 2) Formula Indikator = $(X/Y) \times 100 \%$
X = jumlah peserta yang lulus pengembangan kompetensi jabatan fungsional
Y = jumlah peserta pengembangan kompetensi jabatan fungsional
 - c. Faktor yang Mendukung Keberhasilan
 - 1) Pengembangan kompetensi jabatan fungsional dilaksanakan berdasar kebutuhan penggunaannya.
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi jabatan fungsional sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
 - d. Hambatan
 - 1) Belum terbangunnya kesamaan persepsi antar *stakeholder* dalam hal pengembangan kompetensi.

- 2) Dinamika perubahan di organisasi (baik internal maupun eksternal) yang terkait dengan regulasi, ketersediaan anggaran, sarana prasarana, SDM, maupun sumber daya lainnya.

e. Tindak Lanjut

- 1) Mitigasi resiko dalam menghadapi dinamika perubahan.
- 2) Menyusun langkah alternatif solusi bagi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

2.4 Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tersaji pada aplikasi e-controlling adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
 Capaian Kinerja Keuangan
 Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Langsung terdiri:	4.206.789.000	4.123.224.753	98,01 %
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
Rata-rata penyerapan anggaran				98,01 %

Berdasarkan tabel 2.4.1 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional sebesar 98,01%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sangat baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 83.564.247,- atau 0,01%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan serapan honorarium penatar, pengiriman paket, serta perjalanan dinas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas, maka diketahui bahwa capaian kinerja program Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 **Sangat Tinggi**; dan berdasarkan tabel 2.3.1 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 98,01%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 **sangat tinggi** meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 83.564.247,- atau 0,01%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan serapan honorarium penatar, pengiriman paket, serta perjalanan dinas.

B. Rekomendasi


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan dalam upaya peningkatan kinerja program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kerjasama secara intensif dengan instansi pembina terkait dengan metode penyelenggaraan pelatihan secara digitalisasi;

2. Standarisasi kompetensi para tenaga pengajar khususnya widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga mampu menunjang capaian kinerja organisasi.

Semarang, Januari 2024

Mengetahui
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 197212061994121001

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL


Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19730501 199801 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 197212061994121001

Pihak pertama

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL


Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi jabatan fungsional	100 %


Program	Anggaran	Keterangan
---------	----------	------------

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi jabatan fungsional Rp. 3.654.902.000,- APBD

Pihak kedua

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**


Dr. SABIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 197212061994121001

Semarang, 08 September 2023

Pihak pertama

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL**


Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001



LAPORAN KINERJA

ADMINISTRATOR

2023

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL**

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	1
1.2 Struktur Jabatan	2
1.3 Isu Strategis	3

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja	4
2.2 Rencana Aksi	4
2.3 Analisis Kinerja.....	4
2.3.1 Capaian Kinerja	4
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	7
2.4 Kinerja Keuangan	8

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan	10
3.2 Rekomendasi	10

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rentang Pengukuran Capaian Kinerja -----	5
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial -----	6
Tabel 2.3 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 -----	8

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah --	2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Rencana Stratejik 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2024

Pit.KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL
Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Teknis



SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina
NIP. 196709221998031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah, Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Tinggi dan Jabatan Administrator, dan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan kompetensi pimpinan perangkat daerah;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
- 3) Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pengawas dan pelatihan prajabatan;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

Sub bidang sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing kelompok jabatan fungsional berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.

1.3 Isu Strategis

Kemampuan sebuah organisasi dalam menemukan, mengenal dan merespon isu-isu strategis dengan kebijakan dan tindakan yang tepat menentukan eksistensi dari organisasi tersebut. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah menjabarkan isu-isu strategis yang dalam kebijakan adaptif, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelatihan Berorientasi Kebutuhan SDM Organisasi.
2. Melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan, Fasilitasi, & Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN terintegrasi melalui Jateng *Corporate University* menuju Jateng Pinter Bareng.
3. Penguatan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Sarana Prasarana Pelatihan berbasis digital untuk mewujudkan *Techno Training Center*.
4. Fasilitasi kepada *Stakeholders* terkait untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Berkelas Dunia.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tanggal 31 Januari 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tanggal 27 November 2023 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah.
2. Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator;
4. Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas ;
5. Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS ;
6. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader Potensial.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Koordinasi dan konsultasi intensif dengan Instansi Pembina
2. Melakukan promosi, sosialisasi agenda pelatihan yang diselenggarakan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, melalui video, pamflet, sosial media, dll ke K/L, Provinsi, Kab/Kota lain.

- Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan target penyerapan fisik dan keuangan.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Program penyelenggaraan kepegawaian dan perangkat daerah							
	Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah	100% (350 orang)	2171,71% (7601 orang)	5621,71% (19.676 orang)	-	4386,57% (15.353 orang)	12179,99 % (42.630 orang)
	Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	100% (180 orang)	-	-	33,33% (60 orang)	66,67% (120 orang)	100% (180 orang)
	Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	100% (240 orang)	-	-	50% (120 orang)	64,58% (155 orang)	114,58% (275 orang)
	Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	100% (240 orang)	-	-	50% (120 orang)	50% (120 orang)-	100% (240 orang)
	Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	100% (1384 orang)	17,34% (240 Orang)	89,59% (1240 orang)	16,47% (228 orang)	-	123,4% (1.708 orang)
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader Potensial	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	100% (40 Orang)	-	-	-	100% (40 orang)	100% (40 orang)
Rata-rata capaian								2119%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dari 1 program dicapai melalui 6 (enam) kegiatan dengan indikator Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah, jumlah peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jumlah peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator, jumlah peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas, Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS, dan Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial rata-rata capaian kinerjanya 2119% atau kategori "Sangat Baik".

2.3.2 Analisis Capaian Program

Kinerja pada bidang pengembangan kompetensi manajerial berasal dari penyelenggaraan pelatihan Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator, pelatihan struktural jabatan Pengawas, Pelatihan dasar CPNS, Pengembangan kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah diukur berdasarkan realisasi jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Total Pelatihan Kepemimpinan Nasional sebanyak 3 angkatan; Pelatihan Administrator sebanyak 8 angkatan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 6 angkatan, Pelatihan Dasar CPNS 43 angkatan dan Seminar Online 5 seri.

2.4 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel. 2.3
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Langsung terdiri:	16.801.290.000	15.663.644.016	93,23%
1	Pengembangan Kompetensi ASN	16.801.290.000	15.663.644.016	93,23%
	Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah	358.215.000	286.293.950	79,92%
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	3.776.550.000,-	3.542.900.612	93,81%
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	4.322.290.000	3.999.356.850	92,52%
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	2.554.815.000	2.375.656.584	92,99%
	Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS	1.147.241.000	1.077.970.600	93,96%
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader Potensial	99.115.000	92.677.590	93,51%

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar **Rp16.801.290.000,00** terealisasi sebesar **Rp15.663.644.016,00** dan Capaian Kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial sebesar **2119%** dan capaian serapan anggaran sebesar **93,23%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja fisik tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan dengan capaian serapan anggaran sejumlah **93,23%** tersebut artinya kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial "**baik**" dan terdapat anggaran sebesar **Rp883.369.814,00** atau **6,77%** yang tidak dapat diserap karena adanya penyesuaian honor untuk Narasumber dan beberapa Narasumber tidak berkenan menerima honor, anggaran *rapid test* yang tidak terserap dikarenakan peserta sudah melakukan vaksin *booster*, adanya penyesuaian penggunaan jumlah akun zoom yang digunakan serta adanya perubahan metode pembelajaran menggunakan *distance learning*.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai **2119%** dan anggaran sebesar **93,23%**, artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian serapan anggaran sejumlah **93,23%**, tersebut artinya kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial "**baik**" dan terdapat anggaran sebesar **Rp883.369.814,00 atau 6,77%** yang tidak dapat diserap karena adanya penyesuaian honor untuk Narasumber dan beberapa Narasumber tidak berkenan menerima honor, anggaran rapid test yang tidak terserap dikarenakan peserta sudah melakukan vaksin booster, adanya penyesuaian penggunaan jumlah akun zoom yang digunakan serta adanya perubahan metode pembelajaran menggunakan *distance learning*.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan konsultasi intensif dengan Instansi Pembina;

2. Melakukan promosi, sosialisasi agenda pelatihan yang diselenggarakan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, melalui video, pamflet, sosial media, dll ke K/L, Provinsi, Kab/Kota lain; dan
3. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan target penyerapan fisik dan keuangan.

Semarang,

2024

Mengetahui
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 197212061994121001

Pit.KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJERIAL
Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Teknis



SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina
NIP. 196709221998031006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andik Arif Asyafi'i, SH, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, *27* November 2023

Pihak kedua,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


DR. SADIMIN, S.PD, M.ENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL


ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19651109 198703 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Mnajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1. Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS 2. Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial	100% 100%

Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

1. Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS
2. Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial

Anggaran

Rp 5.132.785.000,-
Rp 11.668.505.000,-

Keterangan

APBD – P
APBD – P

Semarang, 6 - Nov - 2023

Pihak kedua,

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dr. Saefudin, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak pertama,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL**

ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19651109 198703 1 010



LAPORAN KINERJA

PEJABAT PENGAWAS

2023

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	1
1.2 Struktur Jabatan	1
1.3 Isu Strategis	3

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja	3
2.2 Rencana Aksi	3
2.3 Analisis Kinerja.....	4
2.3.1 Capaian Kinerja	4
2.3.2 Analisis Pencapaian Program	9
2.4 Kinerja Keuangan.....	13

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan.....	15
3.2 Rekomendasi	15

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.2 a	Capaian Kinerja Program Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.....	5
Tabel 2.2 b	Realisasi Capaian Kinerja Program Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.....	7
Tabel 2.3.1	Capaian Kinerja Keuangan Program Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.....	13

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.....	2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



ATTHATHUR MASSALENA AM, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP.197607162010011003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Pelaksanakan tugas tersebut, merupakan fungsi dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan service excellent;
- l. Penyiapan bahan pelaksanaan command center; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Jabatan

Struktur Jabatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun Nomor 68 Tahun 2021, sebagaimana gambar 1.2 di bawah ini :

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Pergub Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021

1.2 Isu Strategis

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah bagian dari Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang mendukung program Sekretaris dalam memaksimalkan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Indikator memberikan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memberikan pelayanan umum dan kepegawaian dalam rangka mendukung tupoksi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yaitu membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 06 November 2023 meliputi kegiatan dan sub-sub kegiatan, antara lain:

a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Adapun PK Perubahan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah secara lengkap sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang diperjanjikan tahun 2023 yaitu sebagai

berikut :

1. Peningkatan layanan pada administrasi kepegawaian dengan memberikan pelayanan prima, respon cepat, dan akurat
2. Melakukan identifikasi agar program pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan
3. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien
4. Peningkatan koordinasi dengan BPKAD dan BAPPEDA dalam peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, pengelolaan aset dan pengadministrasian keuangan

2.3 Analisis Kinerja

2.2.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022/23 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Sangat Tinggi | : $\geq 91\%$; |
| b. Tinggi | : 76 – 90,99%; |
| c. Sedang | : 66 – 75,99%; |
| d. Rendah | : 51 - 65,99%; |
| e. Sangat Rendah | : $\leq 50,99\%$ |

Tabel 2.2.a
Capaian Kinerja Program
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah yang efektif dan efisien	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	1. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 2.2.b
Realisasi Capaian Kinerja
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)				Capaian (%)
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	<p>Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</p> <p>Presentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</p> <p>Presentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>	100	100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100	100

	Presentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Presentase terlaksananya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Presentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Presentase terlaksananya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 2.2.a, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah adalah Sangat **Tinggi**. Hal ini dikarenakan target-target kinerja yang ditetapkan sebelumnya telah tercapai dengan maksimal didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

2.2.2 Analisis Pencapaian Program

Pencapaian Program pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut :

1. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1. Sasaran Strategis Program

Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

2. Indikator Program

a. Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

b. Formula Indikator

Terpenuhinya dokumen administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

3. Faktor yang mendukung keberhasilan

1) SDM yang berintegritas dan Kompeten

2) Jumlah Barang Milik Daerah dan Kerjasama pihak ketiga

3) Ketersediaan anggaran

4. Hambatan

Banyaknya jumlah Barang Milik Negara yang perlu diamankan

5. Tindakan lanjut

a. Identifikasi Barang Milik Negara secara berkala

b. Peningkatan kualitas pengamanan Barang Milik Negara

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sasaran Strategis Program

Terpenuhinya dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2. Indikator Program

a. Persentase terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

b. Formula Indikator

Terselesainya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3. Faktor yang mendukung keberhasilan

a. SDM yang berintegritas dan Kompeten

b. Ketersediaan anggaran

c. Sarana dan prasarana yang mendukung

4. Hambatan

a. Pengiriman peserta pelatihan kurang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

b. Peraturan tentang kepegawaian yang dinamis

5. Tindaklanjut

a. Melakukan identifikasi agar program pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan

b. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatan

c. *Updating* peraturan kepegawaian yang berlaku

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sasaran Strategis Program

Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah

2. Indikator Program

a. Persentase terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah

b. Formula Indikator

Terpenuhinya dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah

3. Faktor yang mendukung keberhasilan

a. SDM yang berintegritas dan Kompeten

b. Ketersediaan anggaran

c. Sarana dan prasarana yang mendukung

4. Hambatan

a. Waktu pelaksanaan yang dinamis

b. Penyediaan barang pendukung kegiatan instansi yang terkadang disesuaikan dengan acara peringatan hari besar

c. Undangan rapat koordinasi dan kunjungan tamu yang dinamis

5. Tindaklanjut
 - a. Respon tanggap terhadap penyesuaian waktu kegiatan
 - b. Upaya antisipasi terhadap kegiatan diluar kegiatan rutin yang mungkin terjadi

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sasaran Strategis Program

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Indikator Program

- a. Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- b. Formula Indikator

Terpenuhinya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3. Faktor yang mendukung keberhasilan

- a. SDM yang berintegritas dan Kompeten

- b. Jumlah Barang Milik Daerah dan Kerjasama pihak ketiga

- c. Ketersediaan anggaran

- d. Sarana dan prasarana yang mendukung

4. Hambatan

Banyaknya aset yang dibutuhkan terkadang tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia

5. Tindaklanjut

Mengidentifikasi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sasaran Strategis Program

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Indikator Program

- a. Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b. Formula Indikator

Terpenuhinya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. SDM yang berintegritas dan Kompeten

- b. Ketersediaan anggaran

- c. Sarana dan prasarana yang mendukung
- 4. Hambatan
 - a. Dinamika waktu proses persuratan
 - b. Ketersediaan sumber daya yang tersedia
- 5. Tindaklanjut
 - a. Melakukan upaya pencegahan terhadap ketersediaan sumber daya
 - b. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang terpercaya
 - c. Peningkatan kualitas dan respon tanggap terhadap dinamika persuratan

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sasaran Strategis Program

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Indikator Program

- a. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Formula Indikator

Terpenuhinya dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Faktor yang mendukung keberhasilan

- a. SDM yang berintegritas dan Kompeten
- b. Jumlah Barang Milik Daerah dan Kerjasama pihak ketiga
- c. Ketersediaan anggaran
- d. Sarana dan prasarana yang mendukung

4. Hambatan

- a. Banyaknya aset yang dipelihara terkadang tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia
- b. Aset yang banyak dan tersebar di berbagai cluster gedung sedikit menyulitkan dalam inventarisasi

5. Tindaklanjut

- a. Menyediakan formulir aduan pemeliharaan
- b. Mengidentifikasi aset yang perlu penanganan sesuai dengan skala prioritas

2.3 Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Capaian Kinerja Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	200.000.000	198.738.165	99,4%
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.210.000	225.990.978	97,3%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.994.844.000	2.942.611.301	98,3%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.189.900.000	1.110.441.482	93,3%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.984.800.000	8.821.190.655	98,2%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	3.848.222.000	3.828.825.763	99,5%

	Pemerintahan Daerah			
	Total	17.449.976.000	17.127.798.344	98,2%

Berdasarkan tabel 2.3.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar **98,2%**. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 322.177.656 atau 1,8%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Menyesuaikan kebutuhan dalam realisasinya
2. Dampak negosiasi pengadaan yang membuat adanya sisa pagu anggaran

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas, maka diketahui bahwa capaian kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana tersaji pada tabel 2.2.b merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Dan berdasarkan tabel 3.C.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar **98,2%**. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 322.177.656 atau 1,8%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Menyesuaikan kebutuhan dalam realisasinya
2. Negosiasi pengadaan yang membuat sisa pagu anggaran

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasikan dalam upaya peningkatan kinerja program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan program dan anggaran sehingga dapat dilakukan penyesuaian;
2. Evaluasi dan analisis permasalahan pada setiap program dan kegiatan, dikarenakan capaian kegiatan menunjang capaian kinerja organisasi.

Mengetahui
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19780410 199703 1 005

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN


ATTHATHUR MASSALENA AM, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP.197607162010011003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Seliabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ATTHATHUR MASSALENA AM, SE, MM
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.
Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ATTHATHUR MASSALENA AM, SE, MM

Penata Tingkat I
NIP. 19760716 201001 1 003

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO (1)	KEGIATAN (2)	SUB KEGIATAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET (5)
A	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan
B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	27 Orang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	85 Unit
			Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	6028 Unit
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	12 Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya logistik kantor	12 Bulan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	12 Bulan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	12 Bulan
		Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	4 Dokumen

		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	9 Unit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	19 Unit
		Pengadaan: Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit pengadaan aset tetap	1 paket
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	12 Bulan
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya aset tetap lainnya	12 bulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang direhab	44 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor	12 Bulan

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	APBD Perubahan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.100.000	APBD Perubahan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	145.077.000	APBD Perubahan
1.117.710.000	APBD Perubahan	424.165.000	APBD Perubahan	
292.600.000	APBD Perubahan	80.938.000	APBD Perubahan	
36.000.000	APBD Perubahan	105.500.000	APBD Perubahan	
368.220.000	APBD Perubahan	8.505.000	APBD Perubahan	
416.129.000	APBD Perubahan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	864.400.000	APBD Perubahan
310.500.000	APBD Perubahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	310.500.000	APBD Perubahan

	Pengadaan aset tetap lainnya	15.000.000	APBD Perubahan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	APBD Perubahan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.501.000.000	APBD Perubahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.479.300.000	APBD Perubahan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.750.000	APBD Perubahan
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000	APBD Perubahan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.587.220.000	APBD Perubahan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.109.252.000	APBD Perubahan

Semarang, 6 November 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ATTHATHUR MASSALENA AM, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19760716 201001 1 003



LAPORAN KINERJA

PEJABAT PENGAWAS

2023

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
1.2 Struktur Jabatan.....	5
1.3 Isu Strategis	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	7
2.1 Perjanjian Kinerja	7
2.2 Rencana Aksi	7
2.3 Analisis Kinerja	7
2.3.1 Capaian Kinerja	7
2.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja	10
2.4 Kinerja Keuangan	11
BAB III PENUTUP	
A Kesimpulan	13
B Rekomendasi	13

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.2 a : Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Pendaptan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 -----	8
Tabel 2.2 b : Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Pendaptan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 -----	9
Tabel 2.3.1 : Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 -----	11
Tabel 2.3.2 : Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Pendaptan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 -----	12

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Sub Bagian Keuangan Di Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 84 Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Rencana Strategik 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN



AGUNG ISTIONO, SE, Ak. M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19800621 201001 1 022

BAB I

PENDAHULUAN

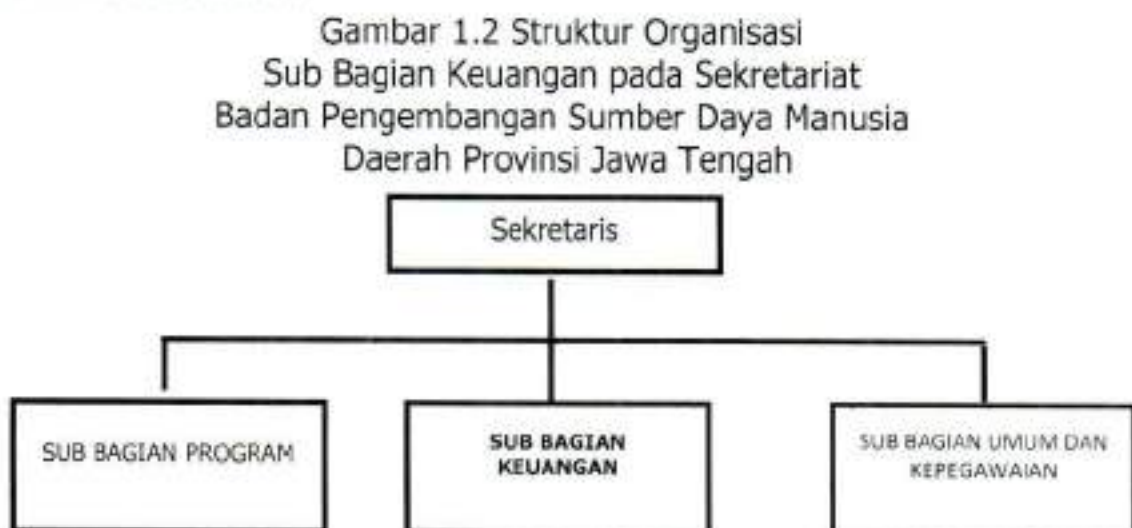
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan dan Aset, merupakan fungsi dari Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Keuangan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan pembukuan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Struktur Jabatan

Struktur Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun Nomor 68 Tahun 2021, sebagaimana gambar 1.2 di bawah ini :



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

1.3. Isu Strategis

Isu Strategis pada umumnya di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Adalah Peningkatan Kompetensi ASN melalui berbagai Metode Pengembangan Kompetensi yang dapat menunjang tugas pokok dan Fungsi ASN.

Sub Bagian Keuangan sebagai Support System Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Selalu mengupayakan pengendalian internal di sektor keuangan dan meningkatkan akuntabilitas dan akurasi data.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 November 2023 meliputi kegiatan dan sub-sub kegiatan sebagai berikut:

- 1). Pelaksanaan administrasi keuangan;
- 2). Pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
- 3). Verifikasi Keuangan

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang diperjanjikan tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah;
2. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.
3. Peningkatan Koordinasi dengan Kab/Kota dan Instansi mitra vertikal guna realisasi pendapatan.
4. Melakukan akselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun Predikat ketercapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|----------------|
| a. Sangat Tinggi | : | $\geq 91\%$; |
| b. Tinggi | : | 76 – 90,99%; |
| c. Sedang | : | 66 – 75,99%; |
| d. Rendah | : | 51 - 65,99%; |
| e. Sangat Rendah | : | $\leq 50,99\%$ |

Tabel 2.2b
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Keuangan

No	Kegiatan	Sub-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					Nilai Capaian
					Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Capaian Akhir	
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	12 Dok	100%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12 dok	3 dok	3 dok	3 dok	12Dok	100%	
		Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	1 Dok	100%	
		Penyusunan Akutansi dan Pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	1 dok	0 dok	0 dok	1 dok	1 Dok	100 %	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	1 Dok	100%	
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	1 dok	0 dok	0 dok	1 dok	1 Dok	100%	
2.	Kegiatan Pendapatan retribusi	Pendapatan Retribusi Daerah	Capaian Realisasi Pendapatan	1 dok	0 dok	0 dok	1 dok	1 Dok	100%	
					Rata-rata capaian					100 %

Tabel 2.2.a
Capaian Kinerja Kegiatan Sub Bagian Keuangan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
1.	Pelayanan Umum ,Kepegawaian,Program dan Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Umum ,Kepegawaian,Program dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	100	89,53	89,53 %
1.	Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan yang transparan dan akuntable	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	100	89,74	89,74 %
2.	Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan Penatausahaan Pendapatan retribusi daerah yang akutanbel	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	100	97,84	97,84%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan dari 2 kegiatan dan 3 sub-sub kegiatan dengan indikator rata-rata capaian **kinerjanya 89,53 %** atau "**Tinggi**" dikarenakan;

2.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja

Pencapaian Program/Kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - a. Sasaran Strategis Kegiatan Administrasi Keuangan
Administrasi Keuangan Yang Akuntabel dan transparan
 - b. Indikator Program
 - 1) Persentase/Jumlah Terealisasinya target kegiatan
 - 2) Formula Indikator
 - c. Faktor yang mendukung keberhasilan
 - 1) Verifikasi Administrasi yang terarah sesuai dengan standar, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Serta Aturan yang berlaku.
 - 2) Koordinasi dan komunikasi yang intens dan terpadu guna menciptakan administrasi keuangan yang akuntabel
 - 3) Terdokumentasinya penatausahaan keuangan secara digital
 - d. Hambatan
 - 1) Kurang Teliti dalam pengadministrasian surat Pertanggung Jawaban.
 - 2) Kurang membaca Peraturan tentang Penatausahaan Keuangan
 - e. Tindak lanjut
 - 1) Verifikator menjadi alat pengendali dan Pengawas Internal, Evaluasi Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan Sistem dan Prosedur Verifikasi.
 - 2) Mensosialisasikan peraturan -peraturan yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan sehingga tidak buta aturan.
 - 3) Digitalisasi Penatausahaan dan pelaporan keuangan pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Sasaran Strategis Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah
Target Pendapatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
 - b. Indikator Program
 - 1) Persentase/Jumlah Terealisasinya Target Kegiatan
 - 2) Formula Indikator
 - c. Faktor yang mendukung keberhasilan
 - 1) Mempromosikan kegiatan dan Sarana Prasarana Guna Pemenuhan target Pendapatan
 - d. Hambatan
 - 1) Instansi Pengampu Jabatan Fungsional yang juga mengadakan kegiatan serupa sehingga pihak Kab/Kota Lebih memilih ke instansi Pengampu

- e. Tindaklanjut
- 1) Tetap menggali Potensi Pendapatan
 - 2) Digitalisasi Penatausahaan Pendapatan

2.4 Kinerja Keuangan

Capaian Kinerja Keuangan Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bagian Keuangan, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk Pendapatan dan untuk membiayai kegiatan yang telah tersaji di E-Controlling sebagaimana tabel 2.3.1 dibawah ini :

Tabel 2.3.1
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 Murni & Perubahan 2023

No	Kegiatan	Sub-Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Murni (Rp)	Pagu Anggaran Pderubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.096.719.000	27.679.000.000	26.457.542.000	95,59 %
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.769.300.000	4.927.730.000	2.701.672.500	54,83%
		Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	69.876.000	69.876.000	68.611.900	98,19%
		Penyusunan Akutansi dan Pelaporan keuangan	71.669.000	71.699.000	70.201.525	97,91%
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	73.100.000	73.100.000	68.756.000	94,06%

	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	125.631.000	125.631.000	121.305.000	99,95%
Rata-rata penyerapan anggaran					89,74 %

Tabel 2.3.2
Pagu Anggaran dan Realisasi Administrasi Pendapatan Kewenangan Daerah Tahun Anggaran 2023 Murni & Perubahan 2023

No	Kegiatan	Sub-Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Murni (Rp)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Administrasi Pendapatan Kewenangan Daerah	Administrasi Pendapatan Kewenangan Daerah	118.174.000	118.174.000	115.625.500	97,84%
penyerapan anggaran					97,84%	

Berdasarkan tabel 2.3.1 dan 2.3.2 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Bagian Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebesar **89,53%**. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Sub Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 3.461.495.575 atau 10,47 %. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Anggaran Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Realisasi 54,83%);
 - a. Efisiensi jam pembelajaran widyaiswara melalui efektifitas penjadwalan
 - b. Terdapat Jabatan Pengelolaan Keuangan Yang Kosong dan tidak dilakukan pengisian dengan pertimbangan efektifitas.
2. Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - a. Berdasarkan hasil rekonsiliasi terdapat Kelebihan Pembayaran yang mengakibatkan Pemprov Jateng dibebaskan pembayaran BPJS kesehatan pada bulan desember
 - b. Perhitungan PPh 21 Pegawai akhir Tahun mengalami Penurunan

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tercapai 100 %, anggaran belanja Kegiatan Administrasi Keuangan sebesar 89,74 % dan Kegiatan Administrasi Pendapatan Kewenangan Daerah sebesar 97,84% rata-rata capaian sebesar **89,53** % $((89,74+97,84)/2)$, sehingga dapat dikategorikan "**Tinggi**".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Semarang, Januari 2024

Mengetahui
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



ANDI SURYANTO, S.STP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN



AGUNG ISTIONO, SE, Ak.M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19800621 201001 1 022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG ISTIONO,SE.Ak,M.Si

JABATAN : KEPALA SUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI SURYANTO,S.STP,M.Si

JABATAN : SEKRETARIS BPSDMD PROV. JATENG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang , 26 November 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


ANDI SURYANTO,S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

Pihak Pertama,
KASUBBAG KEUANGAN


AGUNG ISTIONO,SE.Ak,M.S.i
Penata
NIP. 19800621 201001 1 022

PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO (1)	KEGIATAN (2)	SUB KEGIATAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET (5)
1	Kegiatan Administrasi Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD 5. Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. 6. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN 2. Jumlah terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN. 3. Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi Keuangan 4. Jumlah Dokumen Laporan Akutansi Perangkat Daerah 5. Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun. 6. Jumlah laporan keuanganbulanan/triwulanan/semesteran Perangkat daerah yang disusun 	<p align="center">(5)</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p>
2	Kegiatan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	27.679.000.000	APBDP
2.	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN.	4.927.730.000	APBDP
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi Keuangan	69.876.000	APBDP
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD Jumlah Dokumen Laporan Akutansi Perangkat Daerah	71.699.000	APBDP
5.	Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan	73.100.000	APBDP
6.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran	125.631.000	APBDP
7.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah	118.174.000	APBD

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

Pihak Pertama,
KASUBBAG KEUANGAN



AGUNG ISTIONO, SE, AK, M.Si
Penata
NIP. 19800621 201001 1 022



LAPORAN KINERJA

PEJABAT PENGAWAS

2023

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
ADITYA IIP W.N, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19871005 200602 1 003

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
1.2 Struktur Jabatan	1

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja	3
2.2 Rencana Aksi	3
2.3 Analisis Kinerja	3
2.3.1 Capaian Kinerja	3
2.3.2 Analisis Pencapaian Program	6
2.4 Kinerja Keuangan	7

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan	8
3.2 Rekomendasi	8

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 a : Capaian Kinerja Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	4
Tabel 2.1 b : Realisasi Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	5
Tabel 2.4.1 : Capaian Kinerja Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	7

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	2
---	---

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Program pada Bidang Kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM



ADITYA IIP W.N., S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19871005 200602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan. Tugas tersebut meliputi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- b. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan badan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan; dan
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Struktur Jabatan

Struktur Jabatan Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun Nomor 68 Tahun 2021, sebagaimana gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023



Sumber : Pergub Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) tanggal 31 Januari 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 22 November 2023 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
- b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang diperjanjikan Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai target capaian;
2. Menyusun Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai target capaian.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : $\geq 91\%$;
- b. Tinggi : 76 – 90,99%;
- c. Sedang : 66 – 75,99%;
- d. Rendah : 51 - 65,99%;
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$.

Tabel 2.1.1.a
Capaian Kinerja Sub Bagian Program
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10 Dok	10 Dok	100 %
2.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Dok	21 Dok	100 %

Tabel 2.1.1.b
Realisasi Capaian Kinerja Sub Bagian Program
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)				Capaian (%)
					Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10 Dok	2 dok	3 dok	3 dok	2 dok	100 %
2.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Dok	5 dok	5 dok	5 dok	6 dok	100 %

Berdasarkan table 2.1.a dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "**Sangat Tinggi**". Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan tercapai 100 %.

2.3.2 Analisis Pencapaian Program

Pencapaian Program pada Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a. Sasaran Strategis Program
Tersusunnya Dokumen Perencanaan.
 - b. Indikator Program
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun.
 - c. Faktor kebutuhan
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Hambatan
Tidak ditemui hambatan karena seluruh proses berjalan sesuai waktu pelaksanaan.
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sasaran Strategis Program
Tersusunnya Dokumen Evaluasi.
 - b. Indikator Program
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.
 - c. Faktor kebutuhan
Terlaksananya penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Hambatan
Tidak ditemui hambatan karena seluruh proses berjalan sesuai waktu pelaksanaan.

2.4 Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Capaian Kinerja Keuangan Sub Bagian Program
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.616.000	139.194.500	99,70 %
2.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.384.000	310.315.456	97,77 %
	Total	457.000.000	449.509.956	98,36 %

Berdasarkan tabel 2.4.1, perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) diatas maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan rata-rata sebesar **98,36 %**. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Bagian Program Tahun 2023 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 7.490.044,- atau sebesar 1,64 %. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan;
2. Sisa honorarium kegiatan.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas, maka diketahui bahwa capaian kinerja Sub Bagian Program "**Sangat Tinggi**". Hal ini dikarenakan kegiatan telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Operasional (RKO). Maka perhitungan tabel 2.4.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar **98,36 %**.

Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 7.490.044,- atau sebesar 1,64 %. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :


1. Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan;
2. Sisa honorarium kegiatan.

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 adalah senantiasa mempertahankan kinerja dan serapan anggaran sesuai target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Operasional (RKO).

Semarang, Januari 2024

Mengetahui
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM


ADITYA IIP W.N, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19871005 200602 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Seliabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA IIP W.N, S.STP, M.Si
Jabatan : KASUBBAG PROGRAM

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si.
Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

Semarang, 06 November 2023

Pihak Pertama,
KASUBBAG PROGRAM


ADITYA IIP W.N, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 198710052006021003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10 Dok
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Dok

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.616.000	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.384.000	APBD

Pihak kedua,
SEKRETARIS



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

Semarang, 06 November 2023

Pihak pertama,
KASUBBAG PROGRAM



ADITYA IIP W.N. S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 198710052006021003



LAPORAN KINERJA

SUB KOORDINATOR

2023

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANGAN
PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN
TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI**

**BPSDMD
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
1.2 Struktur Jabatan	1
1.3 Isu Strategis	2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja	3
2.2 Rencana Aksi	3
2.3 Analisis Kinerja	4
2.3.1 Capaian Kinerja	4
2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan/Sub Kegiatan.....	10
2.4 Kinerja Keuangan	13

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan	16
3.2 Rekomendasi.....	16

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi Bpsdmd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3 a : Capaian Kinerja Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	5
Tabel 2.3 b : Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	8
Tabel 2.4.1 : Capaian Kinerja Keuangan Kinerja Kinerja Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Tenaga Pengembang Kompetensi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	14

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	2
---	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

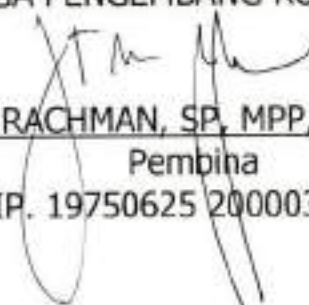
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2024

SUB BIDANG/SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN
TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI


ARIF RACHMAN, SP, MPP, M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19750625 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi, Pelaksanakan tugas tersebut meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama;
- d. menyiapkan bahan sertifikasi dan akreditasi;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi pelaksanaan kerjasama;
- f. menyiapkan bahan regulasi pengembangan kompetensi ASN;
- g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama; dan
- i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Jabatan

Struktur Jabatan Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Dan Tenaga Pengembang Kompetensi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

1.3 Isu Strategis

Gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi adalah Transformasi Paradigma Pengembangan Kompetensi. Transformasi dari Training and Development ke In Learning Development. Transformasi pembelajaran digital efektivitas pembelajaran dan efisiensi anggaran. Metode e-learning blended learning, distance learning sebagai satu metode pembelajaran menjadi semakin dibutuhkan .

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan mencakup 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
- 2) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun PK Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi dalam pencapaian target yang diperjanjikan tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi fasilitasi Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan

Kompetensi dan Fasilitasi Penyusunan Kurikulum dan Modul di lintas bidang penyelenggara Pelatihan di BPSDMD Prov. Jateng, OPD Provinsi Jawa Tengah dan OPD Kabupaten Kota

2. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|----------------|
| a. Sangat Tinggi | : | $\geq 91\%$; |
| b. Tinggi | : | 76 – 90,99%; |
| c. Sedang | : | 66 – 75,99%; |
| d. Rendah | : | 51 - 65,99%; |
| e. Sangat Rendah | : | $\leq 50,99\%$ |

Tabel 2.3.a
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi	Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 Dok	1 Dok	100%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD	36 OPD	100%
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Kompetensi bagi Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	52 Orang	260%
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Perangkat Pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	10 Dok	21 Dok	210%
2.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis					

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi	Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 Dok	1 Dok	100%
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD	36 OPD	100%
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Perangkat Pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	30 Dok	47 Dok	156,66%

**Tabel 2.3.b Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembangan Kompetensi**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)				Capaian (%)
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertjabatan Fungsional	Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 Dok	0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	1 Dok (100%)
		Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD	36	36	36	36	36 OPD (100%)
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Tenaga Pengembangan Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	0	1	0	51	52 Orang (260%)

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)				Capaian (%)
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	10 Dok	0 dok	0 dok	3 dok	18 dok	21 Dok (210%)
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 Dok	0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	1 Dok (100%)
		Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD	36	36	36	36	36 OPD (100%)
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	30 Dok	0	0 dok	3 dok	44 dok	47 Dok (156,66%)

Berdasarkan tabel 2.2.a, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Sangat Tinggi. Hal ini dikarenakan

2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan/Sub Kegiatan

Pencapaian Kegiatan/Sub Kegiatan pada Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut :

1. Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
 - a. Sasaran Strategis Sub Kegiatan
Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi
 - b. Indikator Sub Kegiatan
 - 1) Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan
Formula Indikator : Jumlah Dokumen Metode Bangkom
 - 2) Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi
Formula Indikator : Jumlah OPD/Kab Kota yang dilakukan Analisis Bangkom
 - c. Faktor yang mendukung keberhasilan
 - 1) Adanya Koordinasi yang baik dalam memfasilitasi Penyusunan Rencana Bangkom di OPD maupun di Kab./Kota Prov. Jateng melalui SijariOnAKPK
 - 2) Koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam menyusun metode/ Kurikulum Pengembangan Kompetensi
 - d. Hambatan
 - 1) Tidak semuanya usulan dari OPD/Kab. Kota terfasilitasi dikarenakan terbatasnya anggaran dan jumlah usulan yang kurang dari 30 peserta
 - 2) OPD/Instansi di Kab./Kota dan Provinsi belum menyusun Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi
 - e. Tindak Lanjut
 - 1) Penyusunan Metode Bangkom MOOC yang diharapkan dapat menjangkau banyak peserta sehingga pemenuhan 20 JP per tahun dapat terpenuhi
 - 2) Diharapkan OPD/Instansi dapat menyusun Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi

2. Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
 - a. Sasaran Strategis Sub Kegiatan
Terlaksananya Kompetensi bagi Tenaga Pengembang Kompetensi
 - b. Indikator Sub Kegiatan
 - 1) Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya
 - 2) Formula Indikator : Jumlah Tenaga Bangkom yang mengikuti Orasi Ilmiah dan Seminar Nasional
 - c. Faktor yang mendukung keberhasilan
 - 1) Adanya Koordinasi yang baik dengan Widyaiswara dengan penyelenggara terkait penyusunan seminar nasional sebagai syarat untuk kenaikan jenjang.
 - d. Hambatan
 - 1) Kepadatan Widyaiswara Mengajar sehingga pelaksanaan Seminar Nasional tidak sesuai dengan rencana
 - 2) Formasi untuk Widyaiswara Ahli Utama menyesuaikan dari Lembaga Administrasi Negara
 - e. Tindak Lanjut
 - 1) Koordinasi lebih lanjut dengan Widyaiswara agar penjadwalan Seminar Nasional dapat berjalan sesuai dengan rencana
3. Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
 - a. Sasaran Strategis Sub Kegiatan
Terlaksananya Perangkat Pembelajaran yang disusun/disempurnakan
 - b. Indikator Sub Kegiatan
 - 1) Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan
 - 2) Formula Indikator : Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan
 - c. Faktor yang mendukung keberhasilan
 - 1) Adanya Koordinasi yang baik dalam memfasilitasi Penyusunan Kurikulum dan Modul di OPD maupun di Kab./Kota Prov. Jateng sesuai usulan di SijariOnAKPK
 - 2) Koordinasi yang baik dengan Lembaga/Instansi Terkait dalam Penyusunan Modul dengan Metode MOOC
 - d. Hambatan

- 1) Tidak semuanya usulan dari OPD/Kab. Kota terfasilitasi penyusunan kurikulum dan modul.
- e. Tindak Lanjut
 - 1) Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan dengan Metode MOOC yang menarik ASN sehingga pemenuhan 20 JP per tahun dapat terpenuhi
4. Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Sasaran Strategis Sub Kegiatan
Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi
 - b. Indikator Sub Kegiatan
 - 1) Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan
Formula Indikator : Jumlah Dokumen Metode Bangkom
 - 2) Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi
Formula Indikator : Jumlah OPD/Kab Kota yang dilakukan Analisis Bangkom
 - c. Faktor yang mendukung keberhasilan
 - 1) Adanya Koordinasi yang baik dalam memfasilitasi Penyusunan Rencana Bangkom di OPD maupun di Kab./Kota Prov. Jateng melalui SijariOnAKPK
 - 2) Koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam menyusun metode/ Kurikulum Pengembangan Kompetensi
 - d. Hambatan
 - 1) Tidak semuanya usulan dari OPD/Kab. Kota terfasilitasi dikarenakan terbatasnya anggaran dan jumlah usulan yang kurang dari 30 peserta
 - 2) OPD/Instansi di Kab./Kota dan Provinsi belum menyusun Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi
 - e. Tindak Lanjut
 - 1) Penyusunan Metode Bangkom MOOC yang diharapkan dapat menjangkau banyak peserta sehingga pemenuhan 20 JP per tahun dapat terpenuhi
 - 2) Diharapkan OPD/Instansi dapat menyusun Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi
5. Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
 - a. Sasaran Strategis Sub Kegiatan
Terlaksananya Perangkat Pembelajaran yang disusun/disempurnakan
 - b. Indikator Sub Kegiatan

- 1) Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan
 - 2) Formula Indikator : Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan
- c. Faktor yang mendukung keberhasilan
- 1) Adanya Koordinasi yang baik dalam memfasilitasi Penyusunan Kurikulum dan Modul di OPD maupun di Kab./Kota Prov. Jateng sesuai usulan di SijariOnAKPK
 - 2) Koordinasi yang baik dengan Lembaga/Instansi Terkait dalam Penyusunan Modul dengan Metode MOOC
- d. Hambatan
- 1) Tidak semuanya usulan dari OPD/Kab. Kota terfasilitasi penyusunan kurikulum dan modul.
- e. Tindak Lanjut
- 1) Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan dengan Metode MOOC yang menarik ASN sehingga pemenuhan 20 JP per tahun dapat terpenuhi

2.4 Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Capaian Kinerja Keuangan

**Sub Bidang/Sub Koordinator
Pengembangan Perangkat Pembelajaran
dan Tenaga Pengembang Kompetensi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	64,429,000	62,585,500	97.14 %
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	84,955,000	83,016,019	97.72 %
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	125,905,000	122,341,000	97.17 %
2.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis			
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	43,050,000	42,406,000	98.50%
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	208,200,000	197,351,000	94.79%
	Total	526,539,000	507,699,519	96.42 %

Berdasarkan tabel 2.3.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan

Sub Bidang/Sub Koordinator Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2023 sebesar **96,42%**. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 18.839.481 atau 3,48%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Efisiensi Alokasi anggaran untuk Honorarium Penyusun Modul serta
2. Narsum dari Internal BPSDMD sehingga tidak bisa dibayarkan

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi Sangat Tinggi dengan serapan anggaran sebesar 96,42 % sehingga dapat dikategorikan "Sangat Tinggi".

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Semarang, 2024

Mengetahui
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI DAN PENJAMINAN
MUTU



SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006

SUB BIDANG/SUB KOORDINATOR
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI
PEGAWAI



ARIF RACHMAN, SP, MPP, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19750625 200003 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF RACHMAN, SP, MPP, M.Ec.Dev

Jabatan : PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN AHLI MUDA

ARIF RACHMAN, SP, MPP, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19750625 200003 1 002

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan dan	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Rp. 64.429.000,-	APBDP
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Rp. 125.905.000,-	APBDP
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, dan Sumber Belajar	Rp. 84.955.000,-	APBDP
2.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 43.050.000,-	APBDP
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 209.200.000,-	APBDP

Semarang, 6 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
 PENJAMINAN MUTU**


SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700112 199203 2 008

Pihak Pertama,
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA


ARIF RACHMAN, SP, MPP, M.Ec.Dev
 Pembina
 NIP. 19750625 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	Jumlah Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan Metode	1 Dok
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	10 Dok
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Tenaga Pengembangan Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang
2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan Metode	1 Dok
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	30 Dok



LAPORAN KINERJA

SUB.KOORDINATOR

2023

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SERTIFIKASI KOMPETENSI**

BPSDMD
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
1.2 Struktur Jabatan	1
1.3 Isu Strategis	2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja	3
2.2 Rencana Aksi	3
2.3 Analisis Kinerja.....	4
2.3.1 Capaian Kinerja	4
2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan/Sub Kegiatan.....	10
2.4 Kinerja Keuangan	13

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan	16
3.2 Rekomendasi.....	16

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3 a : Capaian Kinerja Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	5
Tabel 2.3 b : Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	8
Tabel 2.4.1 : Capaian Kinerja Keuangan Kinerja Kinerja Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	14

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	2
---	---

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2024
SUB BIDANG/SUB KOORDINATOR
SERTIFIKASI KOMPETENSI


Dra. HERAWATI WIDYARINI, MM.
Pembina
NIP. 196908171996032004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sertifikasi Kompetensi, meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Sertifikasi Kompetensi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sertifikasi Kompetensi;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Sertifikasi Kompetensi;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perangkat Sertifikasi Kompetensi ASN;
- e. menyiapkan bahan sertifikasi kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sertifikasi Kompetensi; dan
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Jabatan

Struktur Jabatan Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Dan Tenaga Pengembang Kompetensi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

1.3 Isu Strategis

Kementerian PAN – RB sebagai instansi yang berwenang dalam menerjemahkan dan melaksanakan arahan pidato Presiden tersebut telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung proses penyederhanaan birokrasi tersebut. Antara lain dengan mengeluarkan Surat Edaran MenPAN RB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan mencakup 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, diantaranya :

- 1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Adapun PK Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi dalam pencapaian target yang diperjanjikan tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi Sertifikasi Kompetensi di BPSDMD Prov. Jateng, OPD Provinsi Jawa Tengah dan OPD Kabupaten Kota
2. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Sangat Tinggi | : $\geq 91\%$; |
| b. Tinggi | : 76 – 90,99%; |
| c. Sedang | : 66 – 75,99%; |
| d. Rendah | : 51 - 65,99%; |
| e. Sangat Rendah | : $\leq 50,99\%$ |

Tabel 2.3.a
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terlaksananya Skema dan Asesor Sertifikasi	Jumlah Kualifikasi Asesor kompetensi yang dimiliki	5 org	5 org	100%
			Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	5 Jenis	5 Jenis	100%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	150 Orang	711 Orang	474%

**Tabel 2.3.b Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)				Capaian (%)
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Kualifikasi Asesor kompetensi yang dimiliki	5 org	0	0	3	2	5 Dok
		Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	5 Jenis	0	0	1	4	5 Jenis
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	150 Orang	0	329	43	339	711 Orang

Berdasarkan tabel 2.2.a, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Sangat Tinggi.

2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan/Sub Kegiatan

Pencapaian Kegiatan/Sub Kegiatan pada Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut :

1. Sub Kegiatan : Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
 - a. Sasaran Strategis Sub Kegiatan
Terlaksananya Skema dan Asesor Sertifikasi
 - b. Indikator Sub Kegiatan
 - 1) Jumlah Kualifikasi Asesor kompetensi yang dimiliki
 - 2) Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan
 - c. Faktor yang mendukung keberhasilan
 - 1) Koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam menyusun Skema Sertifikasi
 - d. Hambatan
 - 1) Penentuan Skema Sertifikasi yang melibatkan dengan kementerian/Instansi Terkait
 - e. Tindak Lanjut
 - 1) Perlunya adanya kerjasama sertifikasi yang melibatkan kementerian/instansi terkait

2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - a. Sasaran Strategis Sub Kegiatan
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi
 - b. Indikator Sub Kegiatan
 - 1) Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi
 - c. Faktor yang mendukung keberhasilan
 - 1) Peralihan jabatan struktural ke fungsional yang memerlukan uji kompetensi
 - d. Hambatan
 - 1) Pelaksanaan Ujikompetensi yang melibatkan kementerian/Instansi terkait
 - e. Tindak Lanjut
 - 1) Koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Instansi Terkait

2.4 Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Capaian Kinerja Keuangan
Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi
Kompetensi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	100.000.000	94.180.750	94,18 %
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	482.000.000	477.864.651	99,14 %
	Total	582.000.000	572.045.401	98,28 %

Berdasarkan tabel 2.3.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Bidang/Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2023 sebesar **98,28%**. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 9.954.599 atau 1,72%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Efisiensi Alokasi anggaran untuk Makan Minum Kegiatan
2. Sisa Honor Narasumber

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi Sangat Tinggi dengan serapan anggaran sebesar 98,28 % sehingga dapat dikategorikan "Sangat Tinggi".

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga/Instansi Pembina terkait Skema Sertifikasi/Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan OPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terkait pelaksanaan sertifikasi/ uji kompetensi yang efektif dan efisien serta terintegrasi
- 3) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan OPD Provinsi Jawa Tengah terkait Sertifikasi Kompetensi ASN

Semarang, 2024

Mengetahui
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI DAN PENJAMINAN

MUTU


SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006

SUB BIDANG/SUB KOORDINATOR SERTIFIKASI
KOMPETENSI PEGAWAI



Dra. HERAWATI WIDYARINI, MM.
Pembina
NIP. 196908171996032004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. HERAWATI WIDYARINI, MM

Jabatan : ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI SULISTYATI, SE., M.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

SRI SULISTYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN AHLI MUDA

Dra. HERAWATI WIDYARINI, MM
Pembina
NIP. 19690817 199603 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi	150 Orang
		Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Asesor Kompetensi yang dimiliki	5 Orang
			Jumlah Sertifikasi yang dilaksanakan	5 Jenis

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp. 482.000.000,-	APBDP
		Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Rp. 100.000.000,-	APBDP

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
 PENJAMINAN MUTU**



SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
**ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 ASN AHLI MUDA**



Dra. HERAWATI ARDIYANINGRUM, MM
 Pembina
 NIP. 19690817 199603 2 004



LAPORAN KINERJA

SUB.KOORDINATOR 2023

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALIAN MUTU
DAN KERJASAMA**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
1.2 Struktur Jabatan.....	5
1.3 Isu Strategis	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	7
2.1 Perjanjian Kinerja	7
2.2 Rencana Aksi	7
2.3 Analisis Kinerja	7
2.3.1 Capaian Kinerja	7
2.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja	10
2.4 Kinerja Keuangan	11
BAB III PENUTUP	
A Kesimpulan	13
B Rekomendasi	13

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Bidang/Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Kerjasamapada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

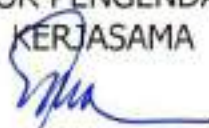
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*),mendorong peningkatan pelayanan publik danmencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Rencana Stratejik 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2024

SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN MUTU DAN
KERJASAMA



MOCHAMAD SAID, SH

Penata Tingkat I

NIP. 196712031987031003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas Jabatan

Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengendalian Mutu Dan Kerjasama, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama;
4. menyiapkan bahan sertifikasi dan akreditasi;
5. menyiapkan bahan rekomendasi pelaksanaan kerjasama;
6. menyiapkan bahan regulasi pengembangan kompetensi ASN;
7. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama; dan
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang/Sub Koordinator Pengendalian Mutu Dan Kerjasama



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

1.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang Urgensi Peran Strategic Partnership dalam pengembangan kompetensi. Diperlukan peran Corporate dalam Strategi Pengembangan Kompetensi untuk mengidentifikasi, menilai dan mengembangkan pengetahuan, keahlian serta kemampuan pegawai dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Sehingga organisasi dapat beradaptasi lebih cepat menghadapi dinamika perubahan, menuntut organisasi menjadi agile dan memiliki learning culture.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Bidang/Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Kerjasama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan dan sub-sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
- 2) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Pengendalian Mutu Dan Kerjasama sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Penyampaian laporan hasil evaluasi pra penyelenggaraan pelatihan, evaluasi tenaga pengajar dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan di kabupaten/kota dan alumni pelatihan dari BPSDMD Provinsi Prov. Jateng
- 3) Melakukan rapat bulanan dengan tim komite penjaminan mutu pelatihan
- 4) Melakukan rapat terkait dengan pemeliharaan ISO 9001:2015 dan ISO 21001 : 2018
- 5) Melakukan konsultasi akreditasi pelatihan ke kementerian/lembaga teknis yang terkait
- 6) Melakukan pembahasan dengan akedimisi/praktisi dalam penyusunan pedoman/petunjuk teknis
- 7) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama

	Kegiatan	Sub-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					Nilai Capaian
					Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Capaian Akhir	
1	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	16 Dok	0	0	8	8	16 Dok	100%
			Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	115 Angk	15	25	40	35	115 Angk	100%
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah pelatihan yang diakreditasi	2 Jenis	0	1	0	1	2 Jenis	100%
			Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	1 Dok	0	0	1	1	2 Dok	200%
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 Dok	0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	1 Dok	100%
2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	12 Dok	0	0	6	6	12 Dok	100%

Kegiatan	Sub-Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Nilai Capaian
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
	Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	22 Angk	5	13	5	40 Angk	181,81%
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempumakan	1 Dok	0 dok	1 dok	0 dok	1 Dok	100%
				Rata-rata capaian				122,72%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Sub Bidang/Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Kerjasama dari 2 kegiatan dan 5 sub-sub kegiatan dengan indikator rata-rata capaian kinerjanya 122,72% atau "Sangat Baik "

2.4 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pengendalian Mutu Dan Kerjasama, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pelatihan yang di akreditasi	47.199.000	46.774.420	99,10%
	Jumlah Dokumen pemeliharaan standar mutu	113.419.000	112.656.275	99,32%
	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	158.549.000	157.584.329	99,39%
	Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	125.215.000	124.720.579	99,60%
	Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun / Disempurnakan	6.736.000	6.736.000	100%
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	8.409.000	7.464.000	88,76%
	Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	32.659.000	32.103.000	98,29%
	Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	7.814.000	7.814.000	100%
Rata-rata penyerapan anggaran		500.000.000	495.852.603	99,17%

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 2 kegiatan dan 5 sub-sub kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar

Rp. 500.000.000 terealisasi sebesar Rp. 495.852.603 dan Capaian 99,17% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.147.397 atau 0,82%

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tercapai 122,72% dengan serapan anggaran sebesar 99,17% sehingga dapat dikategorikan "**Sangat Baik**".

B. Rekomendasi

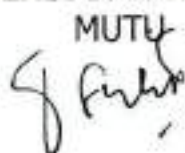
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Semarang,

2024

Mengetahui
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI DAN PENJAMINAN

MUTU


SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700112 199203 2 006

SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN MUTU DAN
KERJASAMA



MOCHAMAD SAID, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMAD SAID, SH

Jabatan : ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN AHLI MUDA

MOCHAMAD SAID, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19671203 198703 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pasca	16 Dok
			Jumlah Pengembangan Kompetensi yang dievaluasi	115 Angk
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Pedoman Teknis yang disusun/disempurnakan	1 Dok
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Standar Mutu	1 Dok
			Jumlah Pelatihan yang Terakreditasi	2 Jenis
2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis, Inti, dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pasca	12 Dok
			Jumlah Pengembangan Kompetensi yang	22 Angk

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</p>	<p>dievaluasi</p> <p>Jumlah Pedoman Teknis yang disusun/disempurnakan</p>	<p>1 Dok</p>

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp. 283.764.000,-	APBD
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Rp. 6.736.000,-	APBD
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Rp. 160.618.000,-	APBD
2.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 41.068.000,-	APBD

	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.814.000,-	APBD
--	--	-----------------	------

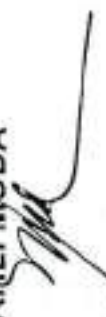
Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
 PENJAMINAN MUTU**



SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
**ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
 AHLI MUDA**



MOCHAMAD SAID, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19671203 198703 1 003



LAPORAN KINERJA (LKj)

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS UMUM

TAHUN 2023

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	1
1.2. Struktur Jabatan.....	2
1.3. Isu Strategis	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
2.1. Perjanjian Kinerja	4
2.2. Rencana Aksi	4
2.3. Analisis Kinerja.....	4
2.3.1. Capaian Kinerja.....	4
2.3.2. Analisis Pencapaian Program	7
2.4. Kinerja Keuangan	8
BAB III PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	9
3.2. Rekomendasi	9

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3.a. Capaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	5
Tabel 2.3.b. Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	6
Tabel 2.4.1. Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	8

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Kompetensi Teknis Umum sumber daya manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS UMUM



LILIK BUDI IRWANTO, S.Sos, MPA
Penata Tingkat I
NIP. 19770722 201001 1 014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
- 4) menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 6) menyiapkan bahan kerjasama pengembangan kompetensi teknis umum;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum; dan
- 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan perkembangan regulasi penyederhanaan birokrasi, Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dipimpin oleh pejabat fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda dengan menjalankan tugas selaku Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

1.3. Isu Strategis

Sesuai tugas dan fungsinya, Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari bidang pengembangan kompetensi teknis, khususnya dalam penyelenggaraan sub kegiatan pengembangan kompetensi teknis umum. Adapun beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis dan berpengaruh bagi kinerja organisasi antara lain :

1. Reformasi Birokrasi telah menunjukkan adanya dinamika perubahan pada organisasi dan tata kelolanya. Hal ini harus diikuti dengan pemenuhan kompetensi bagi SDM Aparatur melalui beragam program pengembangan kompetensi, khususnya yang berkaitan dengan organisasi, kelembagaan dan kepegawaian.
2. Upaya mewujudkan Jawa Tengah Corporate University sebagai suatu entitas pengembangan SDM Aparatur secara terintegrasi. Untuk itu, kolaborasi antar *stakeholder* dan penguatan kelembagaan sangat diperlukan, sehingga beragam program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dapat selaras dan relevan dengan program-program prioritas dalam pembangunan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana telah dilakukan perubahan pada tanggal 6 Nopember 2023 meliputi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis pada Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dengan target indikator kinerja Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis Umum sejumlah 1.080 orang.

2.2. Rencana Aksi

Rencana Aksi yang dilakukan oleh Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dalam pencapaian target yang diperjanjikan yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum,
2. Peningkatan koordinasi dengan para pihak terkait / stakeholder demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2.3. Analisis Kinerja

2.3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- b. Tinggi : 76 - 90,99%
- c. Sedang : 66 - 75,99%;
- d. Rendah : 51 - 65,99%;
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

Tabel 2.3.a.
 Capaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	2.650 orang	4.268 orang	161,06%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis umum	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	1.080 orang	1.402 orang	129,81%

Tabel 2.3.b.
 Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (orang)	Realisasi (orang)				Capaian (orang)
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	1.080	361	347	314	380	1.402

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dari 1 (satu) sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator rata-rata capaian kinerjanya 129,81 % atau **"Sangat Tinggi"**. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan, baik berdasar akreditasi maupun sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015.

2.3.2. Analisis Pencapaian Program

Capaian kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis
 - a. Sasaran Strategis Kegiatan
Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis umum
 - b. Indikator Kegiatan
 - 1) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum
 - 2) Formula Indikator : Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum
 - c. Faktor yang Mendukung Keberhasilan
 - 1) Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan berdasar kebutuhan penggunaannya.
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
 - d. Hambatan
 - 1) Belum terbangunnya kesamaan persepsi antar *stakeholder* dalam hal pengembangan kompetensi.
 - 2) Dinamika perubahan di organisasi (baik internal maupun eksternal) yang terkait dengan regulasi, ketersediaan anggaran, sarana prasarana, SDM, maupun sumber daya lainnya.
 - e. Tindak Lanjut
 - 1) Mitigasi resiko dalam menghadapi dinamika perubahan.

- 2) Menyusun langkah alternatif solusi bagi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis.

2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling, adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4.1.
Capaian Kinerja Keuangan
Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	3.402.130.000	3.040.771.968	89,38
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.098.800.000	972.452.256	88,50

Berdasarkan tabel 2.3.1. dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 88,50%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sudah **Baik**, meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 126.347.744,00 atau sebesar 11,50%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

- Belanja honorarium narasumber / pengajar pelatihan menyesuaikan jumlah jam pelajaran dalam kurikulum yang ditetapkan dan level pengajar yang melaksanakan tugas. Selain itu, beberapa materi pelatihan yang sedianya disampaikan oleh tenaga pengajar dari luar instansi, dapat diampu oleh tenaga pengajar dari internal / widyaiswara, sehingga belanja honorarium tidak terserap maksimal.

BAB III

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja kegiatan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan, baik berdasar akreditasi maupun sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015.

Sedangkan berdasarkan tabel 2.3.1. dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 88,50%, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan termasuk dalam kategori **Baik**, meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 126.347.744,00 atau sebesar 11,50%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan : Belanja honorarium narasumber / pengajar pelatihan menyesuaikan jumlah jam pelajaran dalam kurikulum yang ditetapkan dan level pengajar yang melaksanakan tugas. Selain itu, beberapa materi pelatihan yang sedianya disampaikan oleh tenaga pengajar dari luar instansi, dapat diampu oleh tenaga pengajar dari internal / widyaiswara, sehingga belanja honorarium tidak terserap maksimal.

2.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengembangan kompetensi teknis dengan memperhatikan keselarasan dan relevansi jenis pelatihan, sehingga hasilnya dapat memberi kemanfaatan yang optimal bagi pencapaian sasaran organisasi.

2. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelatihan, agar pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan target kinerja, serta kualitas pelatihan selalu sesuai dengan standar.
3. Peningkatan kecermatan dalam penyerapan anggaran, agar kinerja keuangan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Semarang, Januari 2024

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS

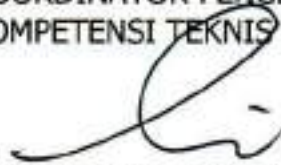


SUMARHENDRO, S.Sos

Pembina

NIP. 19670922 199803 1 006

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS UMUM



LILIK BUDI IRWANTO, S.Sos, MPA

Penata Tingkat I

NIP. 19770722 201001 1 014

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILIK BUDI IRWANTO, S.Sos, MPA

Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda
selaku Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARHENDRO, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS

SUMARHENDRO, S.Sos

Pembina

NIP. 19670922 199803 1 006

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM

LILIK BUDI IRWANTO, S.Sos, MPA

Penata Tingkat I

NIP. 19770722 201001 1 014

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	1.080 orang

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Rp 1.098.800.000	APBD

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS**



SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina
NIP. 19670922 199803 1 006

Pihak Pertama,
**SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS UMUM**



LILIK BUDI IRWANTO, S.Sos, MPA
Penata Tingkat I
NIP. 19770722 201001 1 014



LAPORAN KINERJA (LKj)

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN

TAHUN 2023

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	1
1.2. Struktur Jabatan.....	2
1.3. Isu Strategis	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
2.1. Perjanjian Kinerja	4
2.2. Rencana Aksi	4
2.3. Analisis Kinerja.....	4
2.3.1. Capaian Kinerja.....	4
2.3.2. Analisis Pencapaian Program	7
2.4. Kinerja Keuangan	8
BAB III PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	9
3.2. Rekomendasi	9

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3.a. Capaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	5
Tabel 2.3.b. Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	6
Tabel 2.4.1. Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	8

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan sumber daya manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN



V.W. AGUSTININGTYAS, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19700817 199503 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

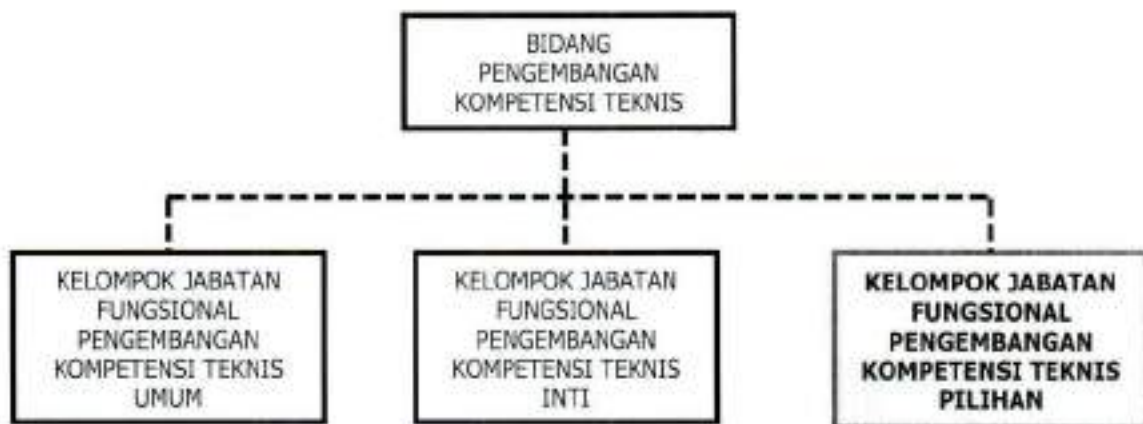
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengembangan kompetensi teknis pilihan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan;
- 4) menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis pilihan;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 6) menyiapkan bahan kerjasama pengembangan kompetensi teknis pilihan;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan; dan
- 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan perkembangan regulasi penyederhanaan birokrasi, Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dipimpin oleh pejabat fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda dengan menjalankan tugas selaku Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

1.3. Isu Strategis

Sesuai tugas dan fungsinya, Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari bidang pengembangan kompetensi teknis, khususnya dalam penyelenggaraan sub kegiatan pengembangan kompetensi Teknis Pilihan. Adapun beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis dan berpengaruh bagi kinerja organisasi antara lain :

1. Munculnya beragam regulasi / peraturan baru terkait pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur. Salah satunya adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang sedikit banyak telah mengubah paradigma manajemen ASN, utamanya dari aspek pengembangan kompetensi.
2. Upaya mewujudkan Jawa Tengah Corporate University sebagai suatu entitas pengembangan SDM Aparatur secara terintegrasi. Untuk itu, kolaborasi antar *stakeholder* dan penguatan kelembagaan sangat diperlukan, sehingga beragam program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dapat selaras dan relevan dengan program-program prioritas dalam pembangunan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana telah dilakukan perubahan pada tanggal 6 Nopember 2023 meliputi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis pada Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan, yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dengan target indikator kinerja Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan sejumlah 780 orang.

2.2. Rencana Aksi

Rencana Aksi yang dilakukan oleh Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dalam pencapaian target yang diperjanjikan yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Teknis Pilihan,
2. Peningkatan koordinasi dengan para pihak terkait / stakeholder demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2.3. Analisis Kinerja

2.3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- b. Tinggi : 76 - 90,99%
- c. Sedang : 66 - 75,99%;
- d. Rendah : 51 - 65,99%;
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

Tabel 2.3.a.
 Capaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	2.650 orang	4.268 orang	161,06%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya pengembangan kompetensi Teknis Pilihan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	780 orang	927 orang	118,85%

Tabel 2.3.b.
 Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (orang)	Realisasi (orang)				Capaian (orang)
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	780	452	97	198	180	927

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dari 1 (satu) sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator rata-rata capaian kinerjanya 118,85 % atau **"Sangat Tinggi"**. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan, baik berdasar akreditasi maupun sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015.

2.3.2. Analisis Pencapaian Program

Capaian kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis
 - a. Sasaran Strategis Kegiatan
Terselenggaranya pengembangan kompetensi Teknis Pilihan
 - b. Indikator Kegiatan
 - 1) Jumlah peserta pengembangan kompetensi Teknis Pilihan
 - 2) Formula Indikator : Jumlah peserta pengembangan kompetensi Teknis Pilihan
 - c. Faktor yang Mendukung Keberhasilan
 - 1) Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan berdasar kebutuhan penggunaannya.
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
 - d. Hambatan
 - 1) Belum terbangunnya kesamaan persepsi antar *stakeholder* dalam hal pengembangan kompetensi.
 - 2) Dinamika perubahan di organisasi (baik internal maupun eksternal) yang terkait dengan regulasi, ketersediaan anggaran, sarana prasarana, SDM, maupun sumber daya lainnya.
 - e. Tindak Lanjut
 - 1) Mitigasi resiko dalam menghadapi dinamika perubahan.
 - 2) Menyusun langkah alternatif solusi bagi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis.

2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling, adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4.1.
Capaian Kinerja Keuangan
Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	3.402.130.000	3.040.771.968	89,38
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	989.030.000	897.138.930	90,71

Berdasarkan tabel 2.3.1. dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 90,71%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sudah **Baik**, meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 91.891.070,00 atau sebesar 8,29%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

- Belanja honorarium narasumber / pengajar pelatihan menyesuaikan jumlah jam pelajaran dalam kurikulum yang ditetapkan dan level pengajar yang melaksanakan tugas. Selain itu, beberapa materi pelatihan yang sedianya disampaikan oleh tenaga pengajar dari luar instansi, dapat diampu oleh tenaga pengajar dari internal / widyaiswara, sehingga belanja honorarium tidak terserap maksimal.

BAB III

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja kegiatan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan, baik berdasar akreditasi maupun sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2015.

Sedangkan berdasarkan tabel 2.3.1. dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 90,17%, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan termasuk dalam kategori **Baik**, meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 91.891.070,00 atau sebesar 8,29%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan : Belanja honorarium narasumber / pengajar pelatihan menyesuaikan jumlah jam pelajaran dalam kurikulum yang ditetapkan dan level pengajar yang melaksanakan tugas. Selain itu, beberapa materi pelatihan yang sedianya disampaikan oleh tenaga pengajar dari luar instansi, dapat diampu oleh tenaga pengajar dari internal / widyaiswara, sehingga belanja honorarium tidak terserap maksimal.

2.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengembangan kompetensi teknis dengan memperhatikan keselarasan dan relevansi jenis pelatihan, sehingga hasilnya dapat memberi kemanfaatan yang optimal bagi pencapaian sasaran organisasi.

2. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelatihan, agar pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan target kinerja, serta kualitas pelatihan selalu sesuai dengan standar.
3. Peningkatan pada proses penatausahaan keuangan agar penyerapan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai rencana.

Semarang, Januari 2024

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS

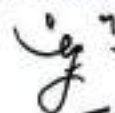


SUMARHENDRO, S.Sos

Pembina

NIP. 19670922 199803 1 006

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN



V.W. AGUSTININGTYAS, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19700817 199503 2 006

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VW. AGUSTININGTYAS, SH, M.Si
Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda
selaku Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARHENDRO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIK

SUMARHENDRO, S.Sos

Pembina

NIP. 19670922 199803 1 006

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS PILIHAN

VW. AGUSTININGTYAS, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19700817 199503 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	740 orang

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Rp 989.030.000	APBD

Semarang, 05 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS



SUMARHENDRO, S.Sos
 Pembina

NIP. 19670922 199803 1 006

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN



Ww. AGUSTININGTYAS, SH, M.Si
 Pembina

NIP. 19700817 199503 2 006



BPSDMD

PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA (LKj)

SUB KOORDINATOR

PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI-----	1
DAFTAR TABEL-----	2
DAFTAR GAMBAR-----	3
KATA PENGANTAR-----	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan-----	5
1.2 Struktur Jabatan-----	6
1.3 Isu Strategis-----	7
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
2.1 Perjanjian Kinerja-----	8
2.2 Rencana Aksi-----	8
2.3 Analisis Kinerja-----	10
2.3.1 Capaian Kinerja-----	10
2.3.2 Analisis Pencapaian Program-----	11
2.4 Kinerja Keuangan-----	13
BAB III PENUTUP	
A Kesimpulan-----	16
B Rekomendasi-----	16

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.3.a	Capaian Kinerja Program Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Derah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.3.b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Derah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.4.1	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Derah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	12

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah -----	6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana

Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategik 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

SUB KOORDINATOR PELATIHAN
PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL



SRI MARYUNI, S.Pd, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19730608 199303 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
- 4) menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 6) menyiapkan bahan kerjasama pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional; dan
- 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Struktur Jabatan

Struktur Jabatan Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

1.3 Isu Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Renstra tahun 2018 – 2023 menegaskan bahwa faktor utama dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi adalah cakupan penyelenggaraan pelatihan, yaitu jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, serta faktor kualitas pelatihan meliputi standar mutu pelaksanaan pelatihan dan alumni pelatihan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan instansi / organisasi pengguna.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi aparatur antara lain rendahnya minat aparatur dalam pengembangan kompetensinya, kurangnya jenis pelatihan yang mengakomodir semua kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, serta belum terpadunya rencana pengembangan kompetensi. Hal itu menjadi isu strategis dalam upaya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur. Kondisi tersebut merupakan suatu tantangan sehingga diperlukan penanganan yang tepat agar menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis tersebut :

- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah agar lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan baik di tingkat lokal, regional, dan nasional;
- Transformasi teknologi pengembangan kompetensi melalui pembelajaran digital;
- Penerapan budaya belajar di setiap stakeholder / instansi pengguna;
- Penerapan *core value* (prinsip utama) ASN sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB, yaitu ASN Ber-AKHLAK;
- Birokrasi berkelas dunia menuju SMART ASN.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023 mencakup satu program yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dengan satu sasaran kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional.

Adapun Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang diperjanjikan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan para pihak terkait / *stakeholder* demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 2) Peningkatan pada proses penatausahaan keuangan, agar penyerapan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai rencana.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi e-controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi : ≥ 91 %
- b. Tinggi : 76 – 90,99 %
- c. Sedang : 66 – 75,99 %
- d. Rendah : 51 – 65,99 %
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99$ %

Tabel 2.3.a
 Capaian Kinerja Program
 Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional	4.260	4.351	102,14%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pembentukan Jabatan fungsional	3.350	3.432	100,45%

Tabel 2.3.b
 Realisasi Capaian Kinerja
 Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pembentukan Jabatan fungsional	3.350	1.060	390	540	1.360	3.432

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional dari 1 (satu) sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator rata-rata capaian kinerjanya 102,45% atau "**Sangat Tinggi**".

2.3.2 Analisis Pencapaian Program

Pencapaian program pada Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dapat dicapai dengan upaya sebagaimana berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Sasaran Strategis Program

Terselenggaranya kegiatan pelatihan pembentukan jabatan fungsional

b. Indikator Program

1) Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pembentukan jabatan fungsional

2) Formula Indikator = $(X/Y) \times 100 \%$

X = realisasi jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional

Y = target jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional

c. Faktor yang Mendukung Keberhasilan

1) Pelatihan pembentukan jabatan fungsional dilaksanakan berdasar kebutuhan penggunaannya.

2) Penyelenggaraan pelatihan pembentukan jabatan fungsional sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

d. Hambatan

1) Belum terbangunnya kesamaan persepsi antar *stakeholder* dalam hal pengembangan kompetensi.

- 2) Dinamika perubahan di organisasi (baik internal maupun eksternal) yang terkait dengan regulasi, ketersediaan anggaran, sarana prasarana, SDM, maupun sumber daya lainnya.

e. Tindak Lanjut

- 1) Mitigasi resiko dalam menghadapi dinamika perubahan.
- 2) Menyusun langkah alternatif solusi bagi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

2.4 Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tersaji pada aplikasi e-controlling adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Keuangan
Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	Jumlah peserta Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	3.350	3.432	102,45%	1.902.369.000	1.868.085.686	98,20 %

Berdasarkan tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional sebesar 97,98%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2023 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 34.283.314,- atau 0,01%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan serapan honorarium penatar, pengiriman paket, serta perjalanan dinas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas, maka diketahui bahwa capaian kinerja program Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 **Sangat Tinggi**; dan berdasarkan tabel 2.3.1 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 98,20%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 **sangat tinggi** meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 34.283.314,- atau 0,01%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan serapan honorarium penatar, pengiriman paket, serta perjalanan dinas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan dalam upaya peningkatan kinerja program dan kegiatan pada Sub Koordinator Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelatihan dengan memperhatikan keselarasan dan relevansi jenis pelatihan, sehingga hasilnya dapat memberi kemanfaatan yang optimal bagi pencapaian visi misi pembangunan daerah.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelatihan, agar pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan target kinerja, serta kualitas pelatihan yang sesuai dengan standar.

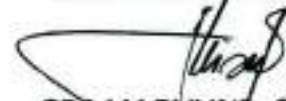
Semarang, Januari 2024

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL



Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

SUB KOORDINATOR
PELATIHAN PEMBENTUKAN
JABATAN FUNGSIONAL



SRI MARYUNI, S.Pd, MM
Penata Tk. I
NIP. 19730608 199303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI MARYUNI, S.Pd, MM
Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab karni.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
AHLI MUDA

SRI MARYUNI, S.Pd, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19730608 199303 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	2.220 orang

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	Rp. 1.908.365.000,-	APBD Perubahan

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL**



Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

AHLI MUDA



SRI MARYUNI, S.Pd, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19730608 199303 2 003



BPSDMD

PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA (LKj)

SUB KOORDINATOR

PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan.....	7
1.3 Isu Strategis.....	8
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
2.1 Perjanjian Kinerja.....	9
2.2 Rencana Aksi.....	9
2.3 Analisis Kinerja.....	11
2.3.1 Capaian Kinerja.....	11
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	12
2.4 Kinerja Keuangan.....	13
BAB III PENUTUP	
A Kesimpulan.....	14
B Rekomendasi.....	14

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.3.a	Capaian Kinerja Program Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.3.b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.4.1	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	12

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah -----	6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana

Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategik 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

SUB KOORDINATOR PELATIHAN
PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL


SUHARTO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19680610 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, emantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pelatihan penjurangan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional;
- 4) menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 6) menyiapkan bahan kerjasama pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional; dan
- 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Struktur Jabatan

Struktur Jabatan Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

1.3 Isu Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Renstra tahun 2018 – 2023 menegaskan bahwa faktor utama dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi adalah cakupan penyelenggaraan pelatihan, yaitu jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, serta faktor kualitas pelatihan meliputi standar mutu pelaksanaan pelatihan dan alumni pelatihan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan instansi / organisasi pengguna.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi aparatur antara lain rendahnya minat aparatur dalam pengembangan kompetensinya, kurangnya jenis pelatihan yang mengakomodir semua kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, serta belum terpadunya rencana pengembangan kompetensi. Hal itu menjadi isu strategis dalam upaya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur. Kondisi tersebut merupakan suatu tantangan sehingga diperlukan penanganan yang tepat agar menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis tersebut :

- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah agar lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan baik di tingkat lokal, regional, dan nasional;
- Transformasi teknologi pengembangan kompetensi melalui pembelajaran digital;
- Penerapan budaya belajar di setiap stakeholder / instansi pengguna;
- Penerapan *core value* (prinsip utama) ASN sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB, yaitu ASN Ber-AKHLAK;
- Birokrasi berkelas dunia menuju SMART ASN.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2022 mencakup satu program yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dengan satu sasaran kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional.

Adapun Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang diperjanjikan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan para pihak terkait / *stakeholder* demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 2) Peningkatan pada proses penatausahaan keuangan, agar penyerapan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai rencana.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi e-controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi : ≥ 91 %
- b. Tinggi : 76 – 90,99 %
- c. Sedang : 66 – 75,99 %
- d. Rendah : 51 – 65,99 %
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99$ %

Tabel 2.3.a
 Capaian Kinerja Program
 Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional	4.260	4.351	102,14%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Penjurangan Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Penjurangan Jabatan fungsional	400	408	102,00%

Tabel 2.3.b
 Realisasi Capaian Kinerja
 Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Penjurangan Jabatan fungsional	400	70	50	168	120	408

Dari tabel 2.3.a tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Sub Koordinator Bidang Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional dari 1 (satu) sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator rata-rata capaian kerjanya 102% atau "**Sangat Tinggi**".

2.3 Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tersaji pada aplikasi e-controlling adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Keuangan
Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional	Jumlah peserta Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional	400	408	102%	1.185.104.000	1.161.146.429	97,98 %

Berdasarkan tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional sebesar 97,98%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Bidang Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 23.957.571,- atau 2,02%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan serapan honorarium penatar, pengiriman paket, serta perjalanan dinas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas, maka diketahui bahwa capaian kinerja program Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 **Sangat Tinggi**; dan berdasarkan tabel 2.3.1 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 97,78%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 **sangat tinggi** meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 23.957.571,- atau 2,02%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan serapan honorarium penatar, pengiriman paket, serta perjalanan dinas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan dalam upaya peningkatan kinerja program dan kegiatan pada Sub Koordinator Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelatihan dengan memperhatikan keselarasan dan relevansi jenis pelatihan, sehingga hasilnya dapat memberi kemanfaatan yang optimal bagi pencapaian visi misi pembangunan daerah.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelatihan, agar pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan target kinerja, serta kualitas pelatihan yang sesuai dengan standar.

Semarang, Januari 2024

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL



Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

SUB KOORDINATOR
PELATIHAN PENJENJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL



SUHARTO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19680610 199803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARTO, SE, M.Si
Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023


Pihak kedua

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL


Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 AHLI MUDA


SUHARTO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19680610 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO (1)	KEGIATAN (2)	SUB KEGIATAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET (5)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	340 orang

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional	Rp. 1.185.104.000,-	APBD Perubahan
		1. Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional		

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL**

Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

**ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
AHLI MUDA**

SUHARTO, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19680610 199803 1 005



BPSDMD

PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA (LKj)

**SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL**

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI-----	1
DAFTAR TABEL-----	2
DAFTAR GAMBAR-----	3
KATA PENGANTAR-----	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan-----	5
1.2 Struktur Jabatan-----	6
1.3 Isu Strategis-----	7
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
2.1 Perjanjian Kinerja-----	8
2.2 Rencana Aksi-----	8
2.3 Analisis Kinerja-----	10
2.3.1 Capaian Kinerja-----	10
2.3.2 Analisis Pencapaian Program-----	11
2.4 Kinerja Keuangan-----	13
BAB III PENUTUP	
A Kesimpulan-----	16
B Rekomendasi-----	16

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.3.a	Capaian Kinerja Program Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Derah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.3.b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Derah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.4.1	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Derah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	12

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah -----	6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan

mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategik 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

SUB KOORDINATOR PELATIHAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL



MARINI HASID, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19830428 200312 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional. Pelaksanaan tugas tersebut, merupakan fungsi dari Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional;
- 3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 5) Menyiapkan bahan kerjasama Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional; dan
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Struktur Jabatan

Struktur Jabatan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

1.3 Isu Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Renstra tahun 2018 – 2023 menegaskan bahwa faktor utama dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi adalah cakupan penyelenggaraan pelatihan, yaitu jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, serta faktor kualitas pelatihan meliputi standar mutu pelaksanaan pelatihan dan alumni pelatihan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan instansi / organisasi pengguna.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi aparatur antara lain rendahnya minat aparatur dalam pengembangan kompetensinya, kurangnya jenis pelatihan yang mengakomodir semua kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, serta belum terpadunya rencana pengembangan kompetensi. Hal itu menjadi isu strategis dalam upaya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur. Kondisi tersebut merupakan suatu tantangan sehingga diperlukan penanganan yang tepat agar menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis tersebut :

- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah agar lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan baik di tingkat lokal, regional, dan nasional;
- Transformasi teknologi pengembangan kompetensi melalui pembelajaran digital;
- Penerapan budaya belajar di setiap stakeholder / instansi pengguna;
- Penerapan *core value* (prinsip utama) ASN sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB, yaitu ASN Ber-AKHLAK;
- Birokrasi berkelas dunia menuju SMART ASN.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2022 mencakup satu program yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dengan satu sasaran kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.

Adapun Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi yang dilakukan oleh Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang diperjanjikan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi teknis bagi jabatan fungsional .
- 2) Peningkatan koordinasi dengan para pihak terkait / *stakeholder* demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagaimana tersaji pada aplikasi e-controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi : ≥ 91 %
- b. Tinggi : 76 – 90,99 %
- c. Sedang : 66 – 75,99 %
- d. Rendah : 51 – 65,99 %
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99$ %

Tabel 2.3.a
 Capaian Kinerja Program
 Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Jabatan fungsional	4.260	4.351	102,14%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan fungsional	510	511	100,20%

Tabel 2.3.b
Realisasi Capaian Kinerja
Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan fungsional	510	80	130	231	70	511

Dari tabel 2.3.a tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Sub Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional dari 1 (satu) sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator rata-rata capaian kinerjanya 102,20% atau "**Sangat Tinggi**".

2.3.2 Analisis Pencapaian Program

Pencapaian program pada Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dapat dicapai dengan upaya sebagaimana berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Sasaran Strategis Program

Terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional

b. Indikator Program

1) Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional

2) Formula Indikator = $(X/Y) \times 100 \%$

X = realisasi jumlah peserta pelatihan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional

Y = target jumlah peserta pelatihan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional

c. Faktor yang Mendukung Keberhasilan

1) Pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan berdasar kebutuhan penggunanya.

2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional sudah sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

d. Hambatan

1) Belum terbangunnya kesamaan persepsi antar *stakeholder* dalam hal pengembangan kompetensi.

- 2) Dinamika perubahan di organisasi (baik internal maupun eksternal) yang terkait dengan regulasi, ketersediaan anggaran, sarana prasarana, SDM, maupun sumber daya lainnya.

e. Tindak Lanjut

- 1) Mitigasi resiko dalam menghadapi dinamika perubahan.
- 2) Menyusun langkah alternatif solusi bagi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

2.4 Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tersaji pada aplikasi e-controlling adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Keuangan
Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	510	511	102,20%	1.119.316.000	1.093.992.638	97,74 %

Berdasarkan table 2.4 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional sebesar 97,74%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan

Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 25.323.362,- atau 2,26%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan serapan honorarium penatar, pengiriman paket, serta perjalanan dinas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas, maka diketahui bahwa capaian kinerja program Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 **Sangat Tinggi**; dan berdasarkan tabel 2.3.1 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 97,74%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 **sangat tinggi** meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 25.323.362,- atau 2,26%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan serapan honorarium penatar, pengiriman paket, serta perjalanan dinas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan dalam upaya peningkatan kinerja program dan kegiatan pada Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelatihan dengan memperhatikan keselarasan dan relevansi jenis pelatihan, sehingga hasilnya dapat memberi kemanfaatan yang optimal bagi pencapaian visi misi pembangunan daerah.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelatihan, agar pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan target kinerja, serta kualitas pelatihan yang sesuai dengan standar.

Semarang, Januari 2024

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL



Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL



MARINI HASID, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19830428 200312 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Sellaburji Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARINI HASID, S.STP, MM
Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
AHLI MUDA

MARINI HASID, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19830428 200312 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	460 orang

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	Rp. 1.119.316.000,-	APBD Perubahan
		1. Jumlah peserta pelatihan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional		Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL



Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
 Pembina Tk. I

NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 AHLI MUDA



MARINI HASID, S.STP, MM
 Penata Tingkat I

NIP. 19830428 200312 2 001



LAPORAN KINERJA

SUB KOORDINATOR

2023

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	1
1.2 Struktur Jabatan.....	2
1.3 Isu Strategis	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
2.1 Perjanjian Kinerja	5
2.2 Rencana Aksi	5
2.3 Analisis Kinerja.....	6
2.3.1 Capaian Kinerja	6
2.3.2 Analisis Pencapaian Program	8
2.4 Kinerja Keuangan	11
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	12
3.2 Rekomendasi	12
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Perangkat Daerah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rentang Pengukuran Capaian Kinerja	6
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Perangkat Daerah	7
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (<i>cost per outcome</i>)	11

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rentang Pengukuran Capaian Kinerja	6
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Perangkat Daerah	7
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (<i>cost per outcome</i>)	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Rencana Strategik 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2024

KETUA KELOMPOK KERJA JABATAN
FUNGSIONAL PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH



ARI DHAMAYANTI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 197811192010012008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah pada Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah, yang meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengembangan kompetensi pimpinan Perangkat Daerah;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 4) menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 6) menyiapkan bahan kerjasama pengembangan kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah; dan
- 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2 Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial terdiri atas:

- Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dikoordinir oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.

1.3 Isu Strategis

Kemampuan sebuah organisasi dalam menemukan, mengenal dan merespon isu-isu strategis dengan kebijakan dan tindakan yang tepat menentukan eksistensi dari organisasi tersebut. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber

Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah menjabarkan isu-isu strategis yang dalam kebijakan adaptif, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelatihan Berorientasi Kebutuhan SDM Organisasi.
2. Melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan, Fasilitasi, & Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN terintegrasi melalui Jateng Corporate University menuju Jateng Pinter Bareng.
3. Penguatan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Sarana Prasarana Pelatihan berbasis digital untuk mewujudkan *Techno Training Center*.
4. Fasilitasi kepada *Stakeholders* terkait untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Berkelas Dunia.

Secara khusus, isu strategis pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, diturunkan dari poin pertama, ketiga dan keempat dari kebijakan Adaptif Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Sedangkan secara spesifik pada subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah terdapat beberapa isu strategis tambahan yang terkait penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi ASN merupakan kewajiban bagi setiap ASN sesuai dengan UU nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan yang mampu menghasilkan pemimpin yang memenuhi level jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB no. 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
3. BPSDSM Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu BPSDSM yang dinilai oleh LAN terbaik dalam menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan;
4. Akreditasi penyelenggara pelatihan yang telah diterima oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mendorong untuk meningkatkan pelayanan, tidak hanya melayani Kabupaten/Kota di kawasan Jawa Tengah, namun juga seluruh wilayah Indonesia;
5. Pemanfaatan teknologi pembelajaran terintegrasi dalam penyelenggaraan pelatihan melalui *Jateng Corporate University*;
6. Dengan adanya pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia, dimana berdasarkan Permendagri 14 Tahun 2018 tentang Orientasi dan Pementapan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kab/Kota maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk menyelenggarakan Orientasi Anggota DPRD Kab/Kota di Tahun 2024;
7. Pengembangan kompetensi bagi kader potensial yang telah lulus *talent scouting* dan masuk ke database *talent pool* dan juga sebagai wujud manajemen talenta Provinsi Jawa Tengah maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan bagi para kader potensial tersebut dengan menyelenggarakan LGLT;
 8. Isu strategis di Jawa Tengah membutuhkan pemecahan dari berbagai pemangku kepentingan. Sehingga, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah secara *massive* melalui Seminar Online PED diharapkan dapat mewujudkan komitmen bersama antara pemangku kepentingan, juga program kerja dapat tersampaikan hingga lini terbawah.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tanggal 31 Januari 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tanggal 06 November 2023 Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 3) Menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 5) Menyiapkan bahan kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 6) Melakukan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana terlampir pada bagian akhir dari laporan ini

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan khususnya di penyerapan anggaran dapat lebih dioptimalkan;
- 2) Melakukan konsultasi dan koordinasi intensif dengan instansi pembina untuk mendesain metode pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Perangkat Daerah;

- 3) Perlu dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi juga mendorong kerjasama dalam Pengembangan Kompetensi bagi Camat, Lurah dan Non ASN (Kepala Desa dan Anggota DPRD).

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	100% (350 orang)	2171,71% (7601 orang)	5621,71% % (19.676 orang)	-	4386,57% (15.353 orang)	12179,99% (42.630 orang)

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah dari 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator capaian kinerjanya 12179,99% atau "Sangat Baik".

2.3.2 Analisis Capaian Program

Pada tahun 2023, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melalui Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah telah menyelesaikan kegiatan Seminar Nasional Program Eksekutif Daerah yang terdiri dari 5 (lima) seri. Seminar Online dimaksud merupakan tindak lanjut dari isu-isu strategis Jawa Tengah dengan melibatkan pemangku kebijakan, akademisi dan juga praktisi dalam menjawab dan membangun komitmen bersama untuk pemecahan masalah atas isu-isu strategis Jawa Tengah.

Seminar Online Program Eksekutif Daerah dilakukan secara online melalui zoom dan *live streaming* Youtube. Seri pertama bertema "Menjadi ASN Pembelajar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Profesional", dan telah diikuti oleh 7.601 peserta. Program ini diharapkan dapat mensosialisasikan terkait Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, dan selanjutnya dapat menjadi referensi dan membentuk ASN Pembelajar khususnya bagi Pejabat Fungsional dalam menghadapi "Dynamic Governance" yaitu Birokrasi yang efektif, efisien dan bersih dengan ciri *agile* dan adaptif untuk mewujudkan pelayanan public yang prima dan pemerintahan berkelas dunia.

Triwulan kedua telah dilaksanakan dua kali agenda Seminar Online, yaitu seri kedua dan ketiga dengan target capaian kinerja sebanyak 19.676 peserta. Seminar Online seri kedua bertemakan "Penanganan Lonjakan Harga dan Ketersediaan Pangan di Jawa Tengah". Tema ini diusung sebagai salah satu upaya edukasi dan referensi eksekutif daerah dalam rangka menghadapi lonjakan harga pangan di Jawa Tengah serta membangun komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota untuk menghadapi tantangan dan tindak lanjut lonjakan harga pangan yang tengah terjadi di Jawa Tengah saat itu. Seminar ini telah diikuti oleh 867 peserta yang terdiri atas PNS OPD Provinsi Jawa Tengah serta dinas terkait di Kab/Kota. Sedangkan, untuk Seminar Online seri ketiga mengusung tema "Aku Indonesia, Pancasila sebagai Paradigma Berpikir dan Bertindak di Era Globalisasi" tema ini diusung untuk memperingati bulan lahir Pancasila, yang telah diikuti seluruh

PNS OPD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah, Kementerian dan atau Lembaga, serta beberapa Universitas, dengan jumlah total 18.812 peserta.

Triwulan keempat juga menyelesaikan dua kegiatan Seminar Online seri keempat dan kelima. Seri keempat, diikuti oleh 7.082 peserta dengan mengusung tema "Netralitas ASN dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas". Kesiapan PNS dalam menyambut pemilu dan pemilihan tahun 2024 dirasa juga menjadi isu penting agar seluruh PNS di Jawa Tengah maupun diluar Jawa Tengah dapat mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Selain itu, supaya pelayanan public tetap berjalan tanpa adanya intervensi kepentingan.

Seminar Online seri kelima bertema "Mental Sehat, ASN Tangguh dan Produktif" dilaksanakan pada bulan November dengan capaian target sebanyak 8.271 peserta. Tema ini diusung dikarenakan semakin maraknya kasus terkait Kesehatan mental di kalangan masyarakat tak terkecuali PNS. Sehingga, dirasa perlu dan penting dalam mensosialisasikan kesadaran dan kesiapsiagaan terkait isu Kesehatan mental bagi seluruh elemen masyarakat.

Pelaksanaan Seminar Nasional merupakan salah satu program essensial dalam pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, melalui metode daring ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam menjawab tantangan dan isu-isu strategis Jawa Tengah melalui satu program yang *massive* untuk mewujudkan komitmen bersama antara pemangku kepentingan, juga program kerja dapat tersampaikan hingga lini terbawah. Untuk itu, diperlukan percepatan dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan Seminar Online melalui hal-hal berikut :

- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan yang selanjutnya disinkronkan dengan isu-isu strategis Jawa Tengah dan kemudian dirumuskan melalui tema dan sub-tema yang menarik, sehingga selain mampu menjaring peserta juga mampu meningkatkan wawasan dan kompetensi peserta;
- 2) Menyusun juknis sebagai *tools* bagi penyelenggara untuk keseragaman dan ketertiban pelaksanaan Seminar Online;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait (Kementerian/Lembaga, Akademisi serta Praktisi);

- 4) Fleksibilitas anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Narasumber untuk menunjang kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan Seminar Nasional tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Pelaksanaan Seminar Online hingga triwulan kedua (Seminar Online seri satu – ketiga) sesuai dengan *timeline*, namun Seminar Online seri keempat yang rencana dilaksanakan di bulan September, diundur pelaksanaannya di bulan Oktober sesuai arahan dari Sekretaris Daerah untuk mengubah jadwal dikarenakan adanya kegiatan serupa terkait Integritas dan Netralitas PNS yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, terdapat penyesuaian jadwal pada pelaksanaan Seminar Online seri keempat dan kelima. Namun, walaupun terdapat penyesuaian dari segi jadwal target capaian kinerja dan keuangan terkategori sangat baik dan baik.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target :

- 1) Melakukan telaah data yang mencakup isu-isu strategis Jawa Tengah, juga terkait isu-isu terkini yang sedang marak di kalangan masyarakat, kemudian dirumuskan sebagai alternatif tema dan sub tema;
- 2) Melakukan rapat persiapan dengan mengundang para pejabat administrator dan widyaiswara untuk merumuskan tema dan sub tema;
- 3) Penetapan sasaran peserta;
- 4) Penetapan Narasumber yang terdiri dari Dinas terkait, Akademisi dan Praktisi;
- 5) Penyusunan kelengkapan dokumen sebagai pendukung administrasi;
- 6) Penyampaian dan pengiriman dokumen kepada pihak terkait;
- 7) Penetapan tim dan pembagian tugas.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target adalah Kerja sama serta dukungan penuh dari pimpinan, widyaiswara, dan tim bidang pengembangan kompetensi manajerial sehingga pelaksanaan kegiatan di Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan maksimal dan tuntas.

Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan yang terjadi maka alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah penyiapan kebutuhan seminar yang disesuaikan dengan isu strategis dapat dilakukan di awal tahun sehingga cukup waktu untuk menggali dan menyediakan materi pendukung.

2.4 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah	350 orang	42.360 orang	12.179,99 %	358.215.000	286.293.950	79,92%
				Jumlah	358.215.000	286.293.950	79,92%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah sebesar 12179,99% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 79,92%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 79,92% tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah termasuk dalam kategori "baik" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 71.921.050 atau sebesar 20,08% dikarenakan adanya penyesuaian honor untuk Narasumber dan beberapa Narasumber tidak berkenan menerima honor.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan :

1. capaian kinerja fisik tercapai 12179,99% dikategorikan "**Sangat Baik**" dengan realisasi peserta yang melebihi target.
2. Capaian kinerja dari sisi keuangan dikategorikan "**baik**" dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 79,92%, penyerapan anggaran masih belum optimal dikarenakan dari segi penyerapan anggaran adanya efisiensi sebesar 20,08% dikarenakan adanya penyesuaian honor Narasumber dan terdapat beberapa Narasumber yang tidak berkenan menerima honor.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil capaian kinerja, rencana aksi, dan kesimpulan diatas maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan khususnya di penyerapan anggaran dapat lebih dioptimalkan;
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi intensif dengan instansi pembina untuk mendesain metode pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Perangkat Daerah;
3. Menyusun juknis sebagai tools bagi penyelenggara untuk keseragaman dan ketertiban pelaksanaan Seminar *Online*;
4. Fleksibilitas anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Narasumber

5. Perlu dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi juga mendorong kerjasama dalam Pengembangan Kompetensi bagi Camat, Lurah dan Non ASN (Kepala Desa dan Anggota DPRD).

Semarang,

2024

Mengetahui,
Pit.KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL
Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Teknis



SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 196709221998031006

KETUA KELOMPOK KERJA JABATAN
FUNGSIONAL
KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH



ARI DHAMAYANTI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 197811192010012008



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Dhamayanti, M.Psi

Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andik Arif Asyafi'i, SH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, ~~26~~ November 2023

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL

ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19651109 198703 1 010


Pihak pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN AHLI MUDA


ARI DHAMAYANTI, M.Psi
Pembina
NIP 19781119 201001 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sertifikasi, Pengembangan Manajerial dan Fungsional	Kelembagaan, Kompetensi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Penda	350 orang
Sub Kegiatan				
Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Penda				
Anggaran			Keterangan	
Rp. 358.215.000,-			APBD - P	

Pihak kedua,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI MANAJERIAL**


ANDIK ARIFF ASYAFII, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP 19651109 198703 1 010

Semarang,  November 2023
 Pihak pertama,
**ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 ASN AHLI MUDA**


ARI DHAMAYANTI, M.Psi
 Pembina
 NIP 19781119 201001 2 008



LAPORAN KINERJA

SUB KOORDINATOR

2023

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
DAN JABATAN ADMINISTRATOR**

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	1
1.2 Struktur Jabatan.....	2
1.3 Isu Strategis.....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
2.1 Perjanjian Kinerja.....	4
2.2 Rencana Aksi.....	4
2.3 Analisis Kinerja.....	5
2.3.1 Capaian Kinerja.....	5
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	7
2.4 Kinerja Keuangan.....	9
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan.....	11
3.2 Rekomendasi.....	11
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rentang Pengukuran Capaian Kinerja	5
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator	6
Tabel 2.3 Tabel Realisasi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023	7
Tabel 2.4 Tabel Realisasi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2023	8
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (<i>cost per outcome</i>)	9

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

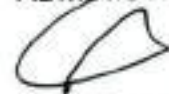
Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Rencana Strategik 2018-2023 yang telah ditetapkan.

Semarang,

2024

KETUA KELOMPOK KERJA JABATAN
FUNGSIONAL PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN
ADMINISTRATOR



MUSTARI, S.H., M.H.

Pembina (IV/A)

NIP. 197510272005011005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator, yang meliputi :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
- c) menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
- d) menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- f) menyiapkan bahan kerjasama pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
- g) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator; dan
- h) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 68 tahun 2021

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial terdiri atas:

- Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan.

Kelompok-Kelompok Kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dikoordinir oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.

1.3 Isu Strategis

Kemampuan sebuah organisasi dalam menemukan, mengenal dan merespon isu-isu strategis dengan kebijakan dan tindakan yang tepat menentukan eksistensi dari organisasi tersebut. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan

eksternal maupun lingkungan internal. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah menjabarkan isu-isu strategis yang dalam kebijakan adaptif, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelatihan Berorientasi Kebutuhan SDM Organisasi.
2. Melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan, Fasilitasi, & Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN terintegrasi melalui *Jateng Corporate University* menuju *Jateng Pinter Bareng*.
3. Penguatan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Sarana Prasarana Pelatihan berbasis digital untuk mewujudkan *Techno Training Center*.
4. Fasilitasi kepada *Stakeholders* terkait untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Berkelas Dunia.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tanggal 31 Januari 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tanggal 06 November 2023 Ketua Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
- 3) Menyelenggarakan pelatihan Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
- 4) Melakukan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator terlampir pada bagian akhir dari laporan ini.

2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Melakukan koordinasi intensif dengan Lembaga Administrasi Negara terkait kurikulum pelatihan, penjadwalan pelatihan sekaligus menyiapkan kompetensi tenaga pengajar yang dibutuhkan;
- 2) Melakukan sosialisasi kegiatan/pelatihan dengan Kabupaten/Kota;

- 3) Koordinasi dengan Kabupaten/Kota /Instansi pengirim peserta pelatihan;
- 4) Konsultasi dengan LAN terkait referensi Narasumber pelatihan;
- 5) Koordinasi Instansi Pengirim untuk memastikan kembali komitmen peserta/instansi pengirim untuk mengimplementasikan Proyek Perubahan (proper) yang sudah dibuat;
- 6) Berkoordinasi dengan Koordinator Widyaiswara untuk memastikan ketersediaan fasilitator dan kesesuaian widyaiswara mengajar pada kompetensinya;
- 7) Menyusun rencana penugasan harian penyelenggaraan pelatihan untuk memastikan pelayanan kepada peserta terselenggara dengan baik;
- 8) Koordinasi dengan lokus tujuan studi lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik;
- 9) Koordinasi internal dengan Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan kesiapan sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan.

2.3 Analisis Kinerja

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
 Pengukuran Kinerja Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
 Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	100% (240 orang)	-	-	50% (120 orang)	64,58% (155 orang)	114,58% (275 orang)
2	Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	100% (180 orang)	-	-	33,33% (60 orang)	66,67% (120 orang)	100% (180 orang)
				Rata-rata capaian				107.29%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator dari 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) indikator sub kegiatan dengan rata-rata capaian kerjanya 107,29% atau "Sangat Baik".

2.3.2 Analisis Capaian Program

Kinerja pada sub kegiatan pertama berasal dari penyelenggaraan pelatihan struktural jabatan administrator diukur berdasarkan realisasi jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Total peserta yang mengikuti Pelatihan Administrator di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sejumlah 275 orang yang terbagi menjadi 8 angkatan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Tabel Realisasi Peserta
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023

Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Realisasi Peserta
PKA Angkatan II	14 Maret – 26 Juli	40 Peserta
PKA Angkatan III	30 Maret – 16 Agustus	40 Peserta
PKA Angkatan IV	9 Mei – 13 September	40 Peserta
PKA Angkatan V	7 Juni – 11 Oktober	40 Peserta
PKA Angkatan VII	3 Juli – 1 November	39 Peserta
PKA Angkatan VIII	26 Juli – 24 November	40 Peserta
PKA Angkatan IX	15 Agustus – 20 November	36 Peserta
Jumlah		275 Peserta

Realisasi peserta sejumlah 275 peserta selama tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan di awal tahun, yakni 240 peserta. Jumlah realisasi yang baru diakui pada triwulan ketiga dan keempat didasarkan pada tanggal selesainya pelatihan yang baru berakhir di triwulan tersebut, meskipun telah dimulai dari Triwulan I tahun 2023. Jika mengacu pada data awal pelaksanaan kegiatan maka realisasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator berubah menjadi 279 orang. Pada PKA Angkatan IX terdapat 1 orang yang mengundurkan diri, dan 2 orang membatalkan keikutsertaan pelatihannya.

Kinerja pada sub kegiatan kedua berasal dari penyelenggaraan pelatihan struktural jabatan pimpinan tinggi pratama diukur berdasarkan realisasi jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Total peserta yang mengikuti Pelatihan Administrator di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sejumlah 180 orang yang terbagi menjadi 3 angkatan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Tabel Realisasi Peserta
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2023

Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Realisasi Peserta
PKN Tk. II Angkatan III	28 Februari – 14 Juli	60 Peserta
PKN Tk. II Angkatan XXIV	6 Juli – 14 November	60 Peserta
PKN Tk. II Angkatan XXXI	7 Agustus – 14 Desember	60 Peserta
Jumlah		180 Peserta

Realisasi peserta sejumlah 180 peserta selama tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun. Jumlah realisasi tersebut baru diakui pada triwulan ketiga dan keempat didasarkan pada tanggal selesainya pelatihan yang baru berakhir di triwulan tersebut, meskipun telah dimulai dari Triwulan I tahun 2023.

Dalam penyelenggaraan pelatihan, beberapa hal yang mendukung dalam pencapaian target kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. BPSDSM Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu BPSDM yang dinilai oleh LAN terbaik dalam menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan.
2. Akreditasi penyelenggara pelatihan yang telah diterima oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mendorong untuk meningkatkan pelayanan, tidak hanya melayani Kabupaten/Kota di kawasan Jawa Tengah, namun juga seluruh wilayah Indonesia.
3. Pemanfaatan teknologi pembelajaran terintegrasi dalam penyelenggaraan pelatihan melalui *Jateng Corporate University*.
4. Jumlah pejabat, baik administrator, maupun jabatan pimpinan tinggi pratama di Indonesia yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan masih sangat tinggi.

Kinerja yang telah mencapai target tersebut bukan berarti tanpa ada kendala yang dialami. Beberapa kendala yang terjadi dalam pencapaian kinerja Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator, antara lain:

1. Peserta PKN Tingkat II, ditentukan oleh LAN RI, terdapat potensi ketidakcocokan antara latar belakang peserta dengan tema pelatihan yang diselenggarakan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Belum tersedianya *database* narasumber pelatihan, sehingga BPSDMD Provinsi Jawa Tengah perlu usaha ekstra untuk mencari Narasumber yang sesuai dengan Tema pelatihan.
3. Perlunya penyeragaman pelayanan yang diberikan petugas kepada peserta pelatihan, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
4. Perlunya peningkatan kualitas sarana yang dimiliki oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pelatihan dan meningkatkan pelayanan pelatihan serta citra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

2.4 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	280 orang	275 orang	98,21%	4.322.290.000	3.999.356.850	92,52%
Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	180 orang	180 orang	100%	3.776.550.000	3.542.900.612	93,81%
				Jumlah	8.098.840.000	7.542.257.462	93,12%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator sebesar 164,58% dikategori "Sangat Baik" dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 93,12% dikategori "Baik". Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja fisik tahun 2023 rata-rata memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian serapan anggaran sejumlah 93,12% tersebut artinya kinerja

Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator "baik" dan terdapat anggaran sebesar Rp 556.582.538 atau sebesar 6,88% yang tidak dapat diserap, dengan penjelasan terdapat komponen belanja pada Studi Lapangan dan Visitasi Kepemimpinan Nasional yang realisasinya lebih kecil dari target semula yaitu pada biaya tiket pesawat dan biaya penginapan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 99,10% dikategorikan "**Baik**" dan anggaran sebesar 93,12%, sehingga dapat dikategorikan "**Baik**" artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan terdapat anggaran sebesar 556.582.538 yang tidak dapat diserap, karena menyesuaikan pada komponen belanja di kegiatan studi lapangan dan visitasi kepemimpinan nasional. Pencapaian yang melebihi target pada tahun 2023 dapat dicapai berkat peran berbagai pihak yang terlibat. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan para *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Jabatan Struktural Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi penyelenggara pelatihan.
3. Membangun sistem Pelayanan Prima yang berpedoman pada *Standard Operating Procedure (SOP)*, yang dapat dilaksanaka bersama-sama oleh penyelenggara pelatihan, peserta pelatihan, maupun pihak lain yang terkait dengan pelatihan kepemimpinan.
4. Pembinaan dan Penguatan Tingkat Disiplin, baik kedisiplinan dalam segi penyelenggara pelatihan maupun kepada peserta pelatihan.
5. Peningkatan kualitas Koordinasi antar Instansi, dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pembina penyelenggaraan pelatihan

kepemimpinan, dengan Kementerian/ Lembaga/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai instansi pengirim peserta pelatihan, Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan.

6. Adanya peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap kinerja aparat pemerintah.

Semarang, 2024

Mengetahui,
Pit. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis



SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 196709221998031006

KETUA KELOMPOK KERJA JABATAN
FUNGSIONAL PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN
ADMINISTRATOR



MUSTARI, SH, MH
Pembina (IV/A)
NIP. 197510272005011005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustari, SH, MH

Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andik Arif Asyafi'i, SH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, *20* November 2023

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL

Pihak pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN AHLI MUDA

ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 196511091987031010

MUSTARI, SH, MH
Pembina
NIP. 197510272005011005

